



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE SELATAN**

PENGUMUMAN

NOMOR : 912/PL.02.2-Pu/7405/2/2024

TENTANG

**PENERIMAAN MASUKAN DAN TANGGAPAN MASYARAKAT PASANGAN CALON
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2024**

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 137 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan mengumumkan Penerimaan Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan sebagai berikut:

No	Nama Lengkap Calon	Partai Politik Pengusung	Status (Mantan Terpidana/ Terpidana)	Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon
1	ADI JAYA PUTRA, B.BUS.,M.COM	Partai Nasdem & Partai Gerindra	Tidak	Memenuhi Syarat
	JAMES ADAM MOKKE, S.Sos.,M.Si		Ya	Memenuhi Syarat
2	HERMAN PAMBAHAKO, SH	Partai PAN, PKB, PPP, PDIP, PBB	Tidak	Memenuhi Syarat
	H. HERIANTO, SE.,M.P.W		Tidak	Memenuhi Syarat

3	IRHAM KALENGGO, S.Sos.,M.Si	Partai Golkar	Tidak	Memenuhi Syarat
	WAHYU ADE PRATAMA IMRAN		Tidak	Memenuhi Syarat
4	MUHAMMAD RADHAN AL- GINDO NUR ALAM	Partai Hanura, PKS, Demokrat	Tidak	Memenuhi Syarat
	RASYID, S.Sos		Tidak	Memenuhi Syarat

Masyarakat dapat memberikan masukan dan tanggapan atas calon dan/atau Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2024 melalui:

1. Portal Publikasi Pemilu dan Pemilihan pada laman: <https://infopemilu.kpu.go.id> dalam fitur “tanggapan” dengan cara:
 - a. memilih tahapan “Pencalonan Peserta Pemilihan Kepala Daerah”
 - b. memilih kategori “Tanggapan terhadap Pasangan Calon Pemilihan Kepala Daerah”
 - c. memilih calon yang akan diberikan masukan dan tanggapan
 - d. mengisi data identitas pemberi masukan dan tanggapan masyarakat
 - e. mengisi jenis masukan dan tanggapan berupa:
 - 1) dukungan atas calon dan/atau pasangan calon,
 - 2) masukan dan tanggapan masyarakat terkait: pasangan calon, status sebagai mantan terpidana dan terpidana termasuk jenis tindak pidananya, dan/atau hasil penelitian persyaratan administrasi calon/penelitian perbaikan persyaratan administrasi calon.
 - f. menuliskan uraian.
 - g. mengunggah dokumen yaitu: KTP-el dan/atau dokumen bukti penunjang yang relevan.
 - h. menekan “SUBMIT”
2. secara luring ke Kantor KPU Kabupaten Konawe Selatan dengan alamat Jl. Poros Andoolo Kendari, Komp Perkantoran Pemda Konawe Selatan, Kab. Konawe Selatan.

penyampaian masukan dan tanggapan masyarakat secara luring dilakukan dengan cara:

- a. mengisi daftar hadir.
- b. mengisi formulir Model TANGGAPAN. MASYARAKAT.KWK.
- c. menyerahkan formulir sebagaimana dimaksud huruf b kepada KPU Kabupaten Konawe Selatan.
- d. menyerahkan fotokopi KTP-el dan/atau dokumen bukti penunjang yang relevan.

Dalam rangka mewujudkan keterbukaan informasi dan mendorong partisipasi masyarakat pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2024, KPU Kabupaten Konawe Selatan mengumumkan visi, misi dan program pasangan calon sebagaimana terlampir.

Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap calon dan/atau Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2024 diterima oleh KPU Kabupaten Konawe Selatan pada tanggal 15 - 18 September 2024.

Demikian untuk di ketahui

Dikeluarkan di Andoolo
Pada tanggal 14 September 2024

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Konawe Selatan



MODEL TANGGAPAN.MASYARAKAT.KWK

**FORMULIR TANGGAPAN MASYARAKAT
TERHADAP PENCALONAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN
WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA*) ...**

Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota*) ...

...
di -
...

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama : ...
- NIK : ...
- Tempat/Tanggal Lahir : ...
- Jenis Kelamin : ...
- Status Perkawinan : ...
- Pekerjaan : ...
- Alamat : ...
- No. Telp/HP : ...
- Alamat Surat Elektronik : ...

A. Menyampaikan masukan dan tanggapan terkait Pasangan Calon/ Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*) ... atas nama ... dengan uraian sebagai berikut:

.....
.....
.....
.....
.....

B. Masukan dan tanggapan ini dilampiri dengan dokumen sebagai berikut:

- 1. KTP-el
- 2.
- 3.
- 4.

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya.

Pemberi Tanggapan,

(...)

Keterangan:

*) Coret yang tidak perlu

***VISI MISI CALON BUPATI
& CALON WAKIL BUPATI
KONAWE SELATAN
PERIODE 2025-2030***

A photograph of two men, Adi Jaya Putra and James Adam Mokke, shaking hands in front of a modern, multi-story building with a red roof and white facade. Both men are wearing white shirts. The man on the left is wearing glasses and has a gold ring on his finger. The man on the right is smiling. The background shows a paved area and a white fence.

**“DESA MAJU KONSEL HEBAT,
INOVATIF, DAN BERKELANJUTAN”**

ADI JAYA PUTRA
CALON BUPATI

JAMES ADAM MOKKE
CALON WAKIL BUPATI

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
BAB I PENDAHULUAN	I - 1
1.1 LATAR BELAKANG	I - 1
1.2 DASAR HUKUM	I - 2
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN	I - 5
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN	I - 6
BAB II GAMBARAN UMUM DAN KONDISI DAERAH	II - 1
2.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI	II - 1
2.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	II - 14
2.3 ASPEK PELAYANAN UMUM	II - 23
2.4 ASPEK DAYA SAING DAERAH	II - 24
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS	III - 1
3.1 PERMASALAH PEMBANGUNAN	III - 2
3.2 ISU STRATEGIS	III - 25
BAB IV VISI, MISI, DAN PROGRAM	IV - 1
4.1 VISI	IV - 1
4.2 MISI	IV - 2
4.3 PROGRAM	IV - 5
BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK	V - 1
5.1 ARAH KEBIJAKAN	V - 1
5.2 SASARAN POKOK	V - 2
BAB VI PENUTUP	VI - 1

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 263 ayat 1, menyatakan dokumen perencanaan pembangunan daerah terdiri atas RPJPD, RPJMD dan RKPD, yang dimaksud dengan RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional megamanatkan kepada daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Dokumen RPJMD merupakan penjabaran visi, misi, dan program kepala daerah yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta memperhatikan RPJM Nasional.

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 DIKTUM KETUJUH : Rancangan RPJPD Tahun 2025-2045 dan Rancangan Teknokratik RPJMD Tahun 2025-2029 menjadi acuan bagi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam penyusunan visi, misi, dan program pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024. Dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Pasal 13 huruf d angka 4 bahwa naskah visi, misi, dan program pasangan calon telah sesuai dengan rencana pembangunan jangka panjang daerah.

Dengan memohon ridho Allah Subhanahu Wataalla, Visi kami yaitu **“KONAWE SELATAN YANG SEJAHTERA, INOVATIF, DAN BERKELANJUTAN”** dengan Tagline **“Desa Maju Konseil Hebat, Inovatif, dan Berkelanjutan**. Visi ini dimaknai sebagai keberlanjutan program pembangunan yang inovatif untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat konawe selatan, dengan harapan semoga tujuan mulia ini senantiasa mendapat bimbingan dan petunjuk dari Allah Subhanahu Wataalla, sehingga apa yang kami niatkan menjadikan Konawe Selatan yang Berkelanjutan, Inovatif, dan Sejahtera dapat tercapai. Amin.. Amin.. Ya Rabbal Alamin...

1.2. Dasar Hukum

Penyusunan Naskah Visi Misi dan Program Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan **Adi Jaya Putra dan James Adam Mokke** Tahun 2025-2030 memperhatikan beberapa peraturan terkait penyusunan dokumen perencanaan pembangunan antara lain :

1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

- beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
14. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
15. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Tahun 2020–2040;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419).

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Penyusunan dokumen Naskah Visi Misi dan Program Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan **Adi Jaya Putra dan James Adam Mokke** Tahun 2025-2030 dimaksudkan untuk menyediakan dokumen awal perencanaan Pembangunan daerah sebagai pedoman dan arah penyelenggaraan Pembangunan dan pemerintahan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan. Naskah Visi Misi dan Program akan menjadi landasan dokumen perencanaan daerah RPJMD, RKPD, maupun dokumen perencanaan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

1.3.2. Tujuan

Penyusunan dokumen Naskah Visi Misi dan Program Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan **Adi Jaya Putra dan James Adam Mokke** Tahun 2025-2030 bertujuan untuk merumuskan visi, misi, dan program pembangunan Kabupaten Konawe Selatan yang berpedoman pada RPJPD Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2025-2045 dan Rancangan Teknokratik RPJMD Tahun 2025-2029. Secara khusus tujuan penyusunan dokumen ini antara lain:

1. Menjadi pedoman keberlanjutan pembangunan Konawe Selatan selama lima tahun kedepan agar tidak menjadi bias yang dapat berimplikasi pada sistem pembangunan yang tidak terencana dan tidak berkelanjutan.
2. Menawarkan *grand design*, gagasan dan pemikiran cerdas tentang upaya melanjutkan perbaikan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Konawe Selatan lima tahun kedepan.
3. Menjadi kontrak politik dan pertanggungjawaban sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih dengan Masyarakat Konawe Selatan.

1.4. Sistematika Penulisan Dokumen Naskah Visi, Misi, dan Program

Dokumen Naskah Visi Misi dan Program Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan **Adi Jaya Putra dan James Adam Mokke** Tahun 2025-2030 mengikuti sistematika yang tercantum dalam pasal 20 Permendagri 86 Tahun 2017 sebagai berikut:

Bab 1 : Pendahuluan

Menjelaskan secara ringkas mengenai isi dokumen secara keseluruhan meliputi: latar belakang penyusunan dokumen; dasar hukum penyusunan; maksud dan tujuan penyusunan dokumen Naskah Visi Misi dan Program Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan **Adi Jaya Putra dan James Adam Mokke** Tahun 2025-2029 ; serta sistematika penulisan

Bab 2 : Gambaran Umum Kondisi Daerah

Menyajikan gambaran umum tentang kondisi kabupaten sebagai salah satu pertimbangan dalam perumusan kebijakan Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang meliputi: aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah, aspek pelayanan umum, trend demografi dan kebutuhan sarana prasarana pelayanan publik dan pengembangan pusat pertumbuhan wilayah.

Bab 3 : Permasalahan dan Isu-isu Strategis Daerah

Memuat pernyataan yang disimpulkan dari kesenjangan antara realita/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia serta memuat kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya akan mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung secara signifikan di masa akan datang

Bab 4 : Visi, Misi dan Program

Menjabarkan Naskah visi, misi dan program daerah berdasarkan permasalahan dan isu strategis Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2025-2029 yang secara terukur dan spesifik yang akan dicapai sesuai Visi Misi RPJPD Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2025-2045

Bab 5 : Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Daerah

Memuat tentang Arah Kebijakan pembangunan jangka menengah untuk menjelaskan keterhubungan Sasaran Pokok dengan pembangunan dilakukan pada lima tahun kedepan. Sasaran Pokok merupakan kuantifikasi (penargetan dengan indikator kinerja) visi dan misi pada periode lima tahun

Bab 6 : Penutup

Menjelaskan tentang program-program unggulan pasangan calon akan dirinci dan dijabarkan secara lebih mendetail pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Konawe Selatan Tahun 2025-2030

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 ASPEK GEOGRAFIS DAN DEMOGRAFI

2.1.1 Karakteristik Fisik Wilayah

Luas Wilayah Kabupaten Konawe Selatan adalah 4.237,74 km² dengan luas wilayah perairan (laut) ± 9.368 km² dan panjang pantai keseluruhan termasuk pulau-pulau kecil yaitu ± 200 km. Wilayah Kabupaten Konawe Selatan berbatasan dengan:

- Kabupaten Konawe dan Kota Kendari (di sebelah Utara)
- Kabupaten Konawe Kepulauan dan Laut Banda (di sebelah Timur)
- Kabupaten Muna Barat dan Selat Tiworo (di sebelah Selatan)
- Kabupaten Bombana dan Kolaka Timur (di sebelah Barat)

Gambar 2.1. Peta Konawe Selatan Konawe Selatan



Secara administratif Konawe Selatan terbagi ke dalam 25 kecamatan dengan sebaran luas sebagai berikut:

Tabel 2.1. Luas Daerah Menurut Kecamatan di Kabupaten Konawe Selatan tahun 2023

No	Kecamatan	Luas (km ²)	No	Kecamatan	Luas (km ²)
1	Tinanggea	320,37	14	Moramo	254,26
2	Lalembu	147,90	15	Moramo Utara	159,76
3	Andoolo	118,66	16	Konda	127,13
4	Buke	181,38	17	Wolasi	158,92
5	Andoolo Barat	79,67	18	Ranomeeto	90,25
6	Palangga	173,75	19	Ranomeeto Barat	69,50
7	Palangga Selatan	107,64	20	Landono	109,76
8	Baito	151,71	21	Mowila	122,89
9	Lainea	205,11	22	Sabulakoa	66,53
10	Laeya	276,72	23	Angata	294,10
11	Kolono	340,29	24	Benua	133,91
12	Kolono Timur	125,01	25	Basala	48,73
13	Laonti	373,77	Luas Konawe Selatan		4.237,74

Sumber: Konawe Selatan dalam Angka 2024

Kecamatan dengan luas terbesar adalah Kecamatan Laonti, diikuti Kecamatan Tinanggea. Sedangkan kecamatan dengan luas terkecil adalah Kecamatan Ranomeeto Barat.

Permukaan tanah Konawe Selatan pada umumnya bergunung dan berbukit yang diapit oleh dataran rendah yang sangat potensial untuk pengembangan di sektor pertanian. Berdasarkan ketinggian dari permukaan laut (DPL), wilayah Kabupaten Konawe Selatan dapat dibedakan atas lima kelompok sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

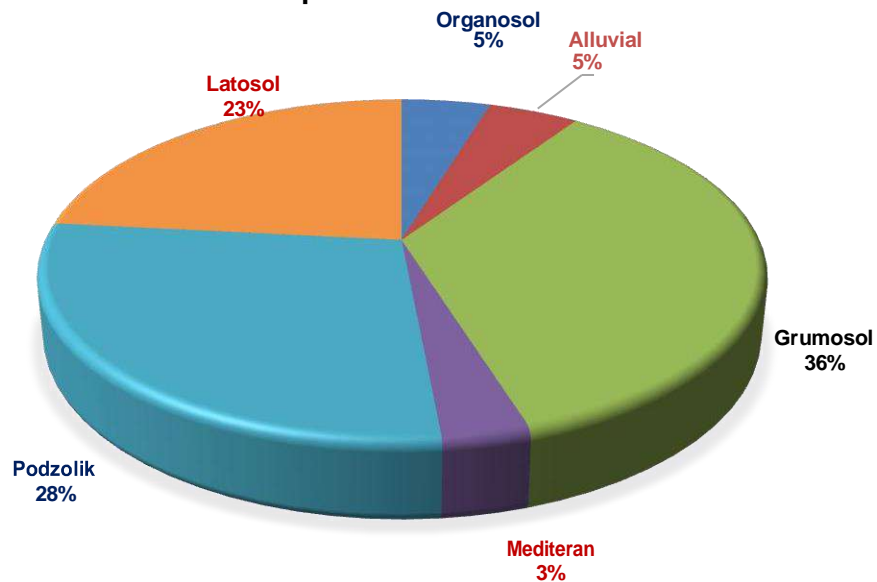
Tabel 2.2. Ketinggian Wilayah Kecamatan di Kabupaten Konawe Selatan

NO	KETINGGIAN	KECAMATAN
1	0-25 meter	Tinanggea, Lainea, Laeya, Kolono Timur, Moramo,
2	26-50 meter	Palangga Selatan, Kolono, Laonti, Moramo Utara, Konda, Sabulako, Ranomeeto Bara
3	51-75 meter	Angata, Lalembuu, Ranomeeto, Basala,
4	76-100 meter	Andoolo Barat, Benua, Mowila,
5	>100 meter	Andoolo, Buke, Palangga, Baito, Wolasi, Ladono

Sumber: Konawe Selatan dalam Angka 2024 (diolah)

Berdasarkan jenis tanahnya, di Kabupaten Konawe Selatan sebagian besar merupakan tipe grumosol, diikuti tipe tanah podzolik, dan latosol. Sedangkan berdasarkan ketinggian, wilayah terluas mempunyai dengan tingkat kemiringan 1,8 – 13,5 derajat, yaitu seluas 147.208,06 Ha (32,61%).

Grafik 2.1. Persentase Luas Wilayah Menurut Jenis Tanah di Kabupaten Konawe Selatan

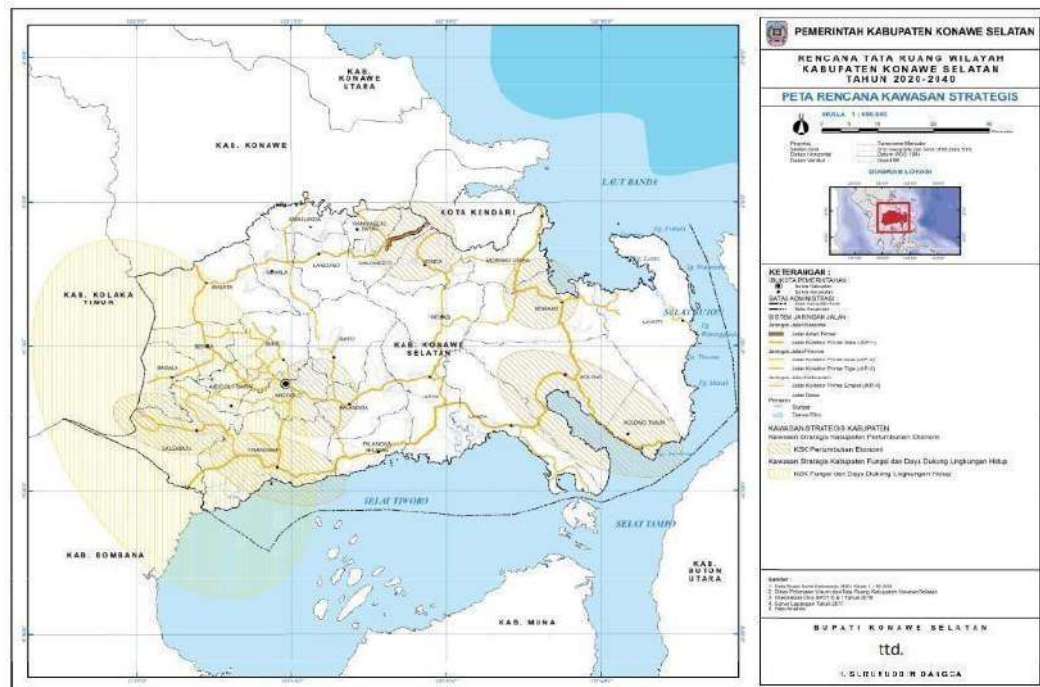


Sumber: Konawe Selatan dalam Angka 2024

2.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2020-2040 (Perda Kabupaten Konsel No. 5 Tahun 2020), kawasan strategis yang dimiliki Kabupaten Konawe Selatan dikelompokkan menurut peruntukannya. Kawasan strategis berbasis perikanan budidaya ditetapkan berada di Kecamatan Tinanggea, Kolono, dan Kolono Timur. Sementara kawasan strategis berbasis pertanian berada di Kecamatan Lalembuu. Kawasan strategis ini berkontribusi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Gambar 2.2. Rencana Kawasan Strategis Konawe Selatan



Sumber: Perda RTRW Kab. Konsel No. 5 Tahun 2020

Selain kawasan strategis, Kabupaten Konawe Selatan juga memiliki kawasan budidaya yang fungsi utamanya didasarkan pada kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber dayabuatan. Kawasan peruntukan budidaya ini antara lain terdiri atas: kawasan hutan produksi, kawasan pertanian, kawasan perikanan, kawasan pertambangan dan energi, kawasan peruntukan industri, dan kawasan pariwisata.

Kawasan hutan produksi terdiri dari hutan produksi terbatas dan hutan produksi tetap. Kawasan hutan produksi terbatas di Kabupaten Konawe Selatan luasnya kurang lebih 3.620 hektar. Potensi ini terdapat di Kecamatan Wolasi, Laeya, Moramo Utara, dan Moramo. Adapun kawasan hutan produksi tetap luasnya kurang lebih 66.767 hektar terdapat di Kecamatan Ranomeeto, Konda, Moramo Utara, Moramo, Kolono, Lainea, Laeya, Wolasi, Baito, Palangga, Palangga Selatan, Tinanggea, Buke, Benua, Angata, Mowila, dan Landonno. Total hutan produksi yang ada 70.387 hektar (Perda RTRW Kab. Konseil No. 5 Tahun 2020).

Kabupaten Konawe Selatan juga memiliki **kawasan pertanian** seluas kurang lebih 163.821 hektar terdiri atas: kawasan tanaman pangan, kawasan hortikultura, kawasan perkebunan, dan kawasan peternakan. Secara umum, kawasan pertanian ada di setiap kecamatan. Namun demikian, sejumlah kecamatan telah ditetapkan sebagai wilayah khusus merujuk pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Konawe Selatan seperti yang tampak dalam tabel berikut.

Tabel 2.3. Sebaran Kawasan Pertanian di Kabupaten Konawe Selatan

Kawasan	Wilayah Kecamatan	Keterangan
Tanaman Pangan	Ranomeeto, Ranomeeto Barat, Konda, Moramo, Moramo Utara, Laonti, Kolono, Wolasi, Sabulakoa, Mowila, Landonno, Lainea, Laeya, Palangga, Palangga Selatan, Andoolo, Andoolo Barat, Buke, Angata, Basala, Lalembu, Baito, dan Tinanggea	Padi
Hortikultura	Ranomeeto, Lainea, Laeya, Moramo, Moramo Utara, Baito, Sabulakoa, dan Palangga	Cabai
	Konda, Wolasi, Laeya, Andoolo, Buke, Basala, Lalembuu, dan Tinanggea	Jeruk
Perkebunan	Benua, Basala, Andoolo, Andoolo Barat, Buke, Lalembuu, Angata, dan Tinanggea	Kakao
	Moramo, Kolono, Laeya, Lainea, Palangga, Tinanggea, Basala, Buke, Baito, Andoolo, Benua, Angata, Mowila, Landonno, Ranomeeto Barat, dan Wolasi	Sawit
	Moramo, Kolono, Laeya, Lainea, Palangga, Tinanggea, Basala, Buke, Baito, Andoolo, Benua, Angata, Mowila, Landonno, Ranomeeto Barat, Konda, dan Wolasi	Tebu
Pternakan	Laeya, Lainea, dan Wolasi	Wilayah pengembangan sapi
	Palangga, Tinanggea, Baito, Buke, Laeya, dan Konda	Sumber bibit Sapi Bali

Sumber: Perda RTRW Kab. Konawe Selatan Nomor 5 Tahun 2020 (diolah)

Kawasan perikanan di Kabupaten Konawe Selatan luasnya sekitar 5.551 hektar yang terdiri dari perikanan tangkap dan kawasan perikanan budidaya. Potensi pengembangan wilayah di sektor perikanan tangkap berada di Kecamatan Kolono dan Kolono Timur sarana dan prasarana perikanan tangkap di daerah ini terdiri dari Tempat Pendaratan Ikan (TPI) sekaligus berfungsi sebagai Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI). Untuk saat ini sudah tersedia TPI/PPI Tinanggea di Kecamatan Tinanggea. Adapun kawasan budidaya air payau berupa tambak berada di Kecamatan Moramo Utara, Moramo, Kolono Timur, Kolono, Lainea, Laeya, Palangga Selatan, dan Tinanggea. Balai Benih Ikan Air Tawar (BBI) meliputi BBI Ranomeeto di Kecamatan Ranomeeto, dan rencana BBI Air Tawar di Kecamatan Laeya, Andoolo, Konda, Angata dan Tinanggea. Kawasan budidaya air tawar direncanakan ada di setiap kecamatan dengan mempersiapkan Balai Benih Ikan Air Laut di Kecamatan Kolono, Palangga Selatan, Tinanggea, Lainea, dan Kolono Timur.

Kawasan pertambangan dan energi di Kabupaten Konawe Selatan luasnya kurang lebih 17.582 hektar yang terdiri atas kawasan pertambangan mineral (logam dan batuan) serta kawasan panas bumi. Kawasan pertambangan mineral logam terdapat di Kecamatan Laonti, Laeya, Palangga Selatan, Palangga, Tinanggea, Lalembuu, dan Andoolo. Adapun kawasan pertambangan batuan terdapat di Kecamatan Moramo Utara, Moramo, dan Laonti. Sementara untuk potensi panas bumi terdapat di Desa Kaindi Kecamatan Lainea, Desa Lamokula Kecamatan Moramo Utara, dan Desa Moramo, Kecamatan Moramo.

Kawasan peruntukan industri di Kabupaten Konawe Selatan memiliki luas sekitar 4.445 hektar merupakan bagian dari perwilayahan industri yang dilaksanakan melalui pengembangan wilayah pusat pertumbuhan industri, kawasan peruntukan industri, kawasan industri, dan sentra industri kecil dan industri menengah. Kawasan peruntukan industri direncanakan di Kecamatan Moramo Utara, Moramo, Laonti, Wolasi, Kolono, Kolono Timur, Lainea, Laeya, Palangga, Palangga Selatan, Tinanggea, Andoolo, Andoolo Barat, Baito, Benua, Buke, Angata, Mowila, Landono, Ranomeeto, dan Konda. Kawasan industri direncanakan di Kecamatan Moramo Utara, Moramo, Palangga Selatan, dan Tinanggea. Adapun sentra industri kecil dan menengah tersebar di beberapa kecamatan menurut jenis industrinya.

Tabel 2.4. Sebaran Kawasan Sentra Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Konawe Selatan

NO	INDUSTRI	KECAMATAN	KET
1	Pengolahan hasil pertanian dan Peternakan	Konda, Buke, Andoolo, Tinanggea, Palangga, Baito, Lainea, Laeya, Moramo, Landonon, Mowila, Angata, Benua, dan Desa Lomboeya Kecamatan Moramo Utara	-
2	Industri pengolahan hasil perkebunan	Ranomeeto	kakao
		Andoolo, Andoolo Barat	tepung tapioka
		Angata, Moramo, dan Mowila	rencana pabrik gula
		Laeya dan Moramo	rencana pabrik
3	Pengolahan hasil perikanan	Tinanggea, Palangga Selatan, Lainea, Kolono, Moramo, Moramo Utara, Laonti, Laeya, dan Kolono Timur	-
4	Pengolahan hasil hutan	Laeya, Lainea, Basala, Landonon, Moramo, Angata, Laonti, Wolasi, Tinanggea, Buke, Andoolo, Kolono, Palangga, Palangga Selatan, Baito, Benua	-
5	Pengolahan hasil pertambangan mineral bukan logam dan batuan	Moramo Utara, Moramo, Kolono, Palangga, Mowila, Ranomeeto, Ranomeeto Barat dan Lalembu	-
6	Sentra industri kreatif	Lainea, Basala	berbahan baku kayu
		Andoolo, Ranomeeto	tenun

Sumber: Perda RTRW Kab. Konawe No. 5 Tahun 2020

Untuk **kawasan pariwisata**, luasnya kurang lebih 57 hektar yang terdiri dari pariwisata alam laut atau bahari, alam pegunungan atau hutan, budaya dan sejarah, serta pariwisata buatan. Sebagian besar daerah yang menjadi potensi wisata alam laut/bahari berada di Kecamatan Laonti. Sementara pariwisata alam pegunungan atau hutan, budaya dan sejarah, serta pariwisata buatan tersebar di beberapa kecamatan. Secara umum, potensi wisata Kabupaten Konawe Selatan ada pada objek alam laut/bahari dan alam pegunungan/hutan seperti yang tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 2.5. Jenis, Objek, Lokasi Wisata di Konawe Selatan

NO	JENIS WISATA	OBJEK	KECAMATAN		
1	Alam laut atau bahari	Pulau Hari, Pulau Hari Kecil, Pulau Lemo, Pulau Cempedak Atas, Pulau Cempedak Bawah, Pulau Lalowatu, Pulau Palioboru, Pulau Palioboru Kecil, Pulau Gala, Pulau Pondiana Utara, Pulau Watulumango, Pulau Watulumango Tengah, Pulau Watulumango Utara, Pulau Watundoluboto, Pulau Burung, Pulau Kapal, Tanjung Gomo, Pantai Namu, Pantai Baho, Pantai Bondu-bontu	Laonti		
		Pantai Polewali, Pantai Bangun Jaya, Mangrove Teluk Kalo-Kalo, Mangrove Lamokahi	Lainea		
		Pulau Lara, Pulau Wawosunggu, Pulau Wawosunggu Kecil	Moramo		
		Pulau Senja, Pulau Wawatu, Pulau Labotaone Kecil	Moramo Utara		
		Pantai Watumelewe, Mangrove Lanowulu	Tinanggea		
		Pulau Tabatabaro, Pantai Batu Putih	Kolono Timur		
		Pantai Torobulu, Mangrove Muara Laeya	Laeya		
		Teluk Kolono	Kolono		
		2	Alam pegunungan atau hutan	Pegunungan Popalia, agrowisata perkebunan, Air Terjun Wolasi	Wolasi
				Air Panas Lainea, Air Panas Kaindi	Lainea
Air Terjun Moramo, Air Panas Amohola	Moramo				
Air Terjun Boro-Boro, agrowisata perkebunan	Ranomeeto Barat				
Air Terjun Lasidaka, agrowisata perkebunan	Konda				
Air Terjun Namu	Laonti				
Air Panas Sungai Roda	Kolono				
Agrowisata perkebunan	Lalembu, Ranomeeto				
3	Budaya dan sejarah	Sabana dan rawa Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai	Tinanggea, Lalembuu, Basala, Benua, Angata		
		Situs makam	Andoolo, Tinanggea, Mowila, Lainea, Palangga, Laeya, Lalembuu		
		Situs Benteng Lapadi	Lainea		
4	Buatan	Situs peninggalan Jepang	Lainea, Laonti		
		Wisata pemancingan buatan	Tinanggea, Mowila, Ranomeeto, Konda		
		Wisata rekreasi bendung	Mowila, Lalembuu, Andoolo, Laeya, dan Tinanggea		
		Bumi Perkemahan	Andoolo, Tinanggea		
		Hutan kota dan taman kota, Alun-alun kabupaten, sarana olah raga (GOR)	Andoolo		

Sumber: Perda RTRW Kab. Konawe No. 5 Tahun 2020 (diolah)

2.1.3 Wilayah Rawan Bencana

Wilayah rawan bencana dapat digambarkan sebagai kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam. Suatu wilayah disebut sebagai rawan bencana jika dalam jangka waktu tertentu mempunyai kondisi dan karakter geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, dan geografis, yang kurang mempunyai kemampuan untuk mencegah, meredam, dan mencapai kesiapan dalam menanggapi dampak buruk dari bahaya bencana yang mungkin muncul. Dalam Perda RTRW No. 5 Tahun 2020 pasal 21, wilayah rawan bencana tersebut meliputi:

- a) **Kawasan rawan gempa bumi** berada di Kecamatan Moramo, Moramo Utara, Laonti, Kolono, Lainea, Laeya, Palangga Selatan, Tinanggea, Lalembuu, Basala, Benua, Angata, Mowila, Landono, Sabulakoa, Ranomeeto Barat, Ranomeeto, Konda, dan Baito. Sementara patahan aktif terdapat di Kecamatan Kolono, Kolono Timur, Laonti, Moramo, Moramo Utara, Konda, Landono, Lainea, Laeya, Lalembuu, Wolasi, Sabulakoa, Mowila, Buke, Andoolo, Tinanggea, Palangga, Palangga Selatan, dan Andoolo Barat.
- b) **Kawasan rawan tsunami** terdapat pada pesisir pantai di Kecamatan Moramo Utara, Moramo, dan Laonti.
- c) **Kawasan rawan abrasi** dengan kerawanan tinggi yang terdapat pada pesisir pantai di sebagian Kecamatan Moramo Utara, dan Tinanggea.
- d) **Kawasan rawan longsor** dengan kerawanan tinggi di Kecamatan Angata, Benua, Mowila, Buke, Baito, Palangga, dan Laeya.
- e) **Kawasan rawan banjir** terdapat di Kecamatan Angata, Basala, Benua, Kolono, Kolono Timur, Konda, Laeya, Lainea, Lalembu, Laonti, Moramo, Moramo Utara, Mowila, Palangga, Palangga Selatan, Sabulakoa, dan Tinanggea.
- f) **Kawasan rawan kebakaran hutan dan lahan** dapat terjadi di setiap kecamatan.
- g) **Kawasan rawan bencana angin puting beliung** terdapat di Kecamatan Laeya, Lainea, Tinanggea, Konda, Andoolo, dan Basala.

2.1.4 Demografi

Berdasarkan hasil sensus penduduk Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Konawe Selatan tahun 2023, jumlah penduduk Kabupaten Konawe Selatan 322.946 jiwa. Jumlah tersebut mengalami pertumbuhan sebesar 4,67 persen antara tahun 2020-2023. Penduduk terbanyak berada di Kecamatan Tinanggea yaitu 25.881 jiwa, kemudian Kecamatan Konda 22.641 jiwa, sedangkan kecamatan dengan penduduk terkecil adalah Kecamatan Sabulakoa dengan jumlah penduduk 5.408 jiwa.

Tabel 2.6. Jumlah Penduduk Tahun 2023 dan Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk tahun 2020-2023

No.	Kecamatan	Jumlah	Pertumbuhan
1	Tinanggea	25.881	3,64
2	Lalembuu	16.371	1,96
3	Andoolo	11.148	5,54
4	Buke	15.160	4,14
5	Andoolo Barat	9.012	2,98
6	Palangga	15.581	5,33
7	Palangga Selatan	7.880	6,60
8	Baito	9.608	6,71
9	Lainea	10.449	4,09
10	Laeya	22.599	5,32
11	Kolono	12.066	5,87
12	Kolono Timur	5.766	7,57
13	Laonti	11.702	13,51
14	Moramo	16.171	3,43
15	Moramo Utara	9.826	10,82
16	Konda	22.641	4,22
17	Wolasi	5.987	5,85
18	Ranomeeto	20.759	-1,38
19	Ranomeeto Barat	8.559	7,18
20	Landonno	9.444	12,54
21	Mowila	14.142	3,23
22	Sabulakoa	5.408	-0,52
23	Angata	18.040	7,31
24	Benua	11.049	1,39
25	Basala	7.697	-0,32
	Konawe Selatan	322.946	4,67

Sumber: Konawe Selatan dalam Angka 2024

Laju pertumbuhan penduduk tertinggi berada di Kecamatan Laonti 13,51. Sedangkan Kecamatan dengan laju pertumbuhan terendah ialah Kecamatan Basala -0,32. Sebaran jumlah dan pertumbuhan penduduk per kecamatan disajikan dalam Tabel 2.6. Selain jumlah dan pertumbuhan penduduk, tabel berikut menunjukkan persentase dan kepadatan penduduk per kecamatan di Kabupaten Konawe Selatan tahun 2023.

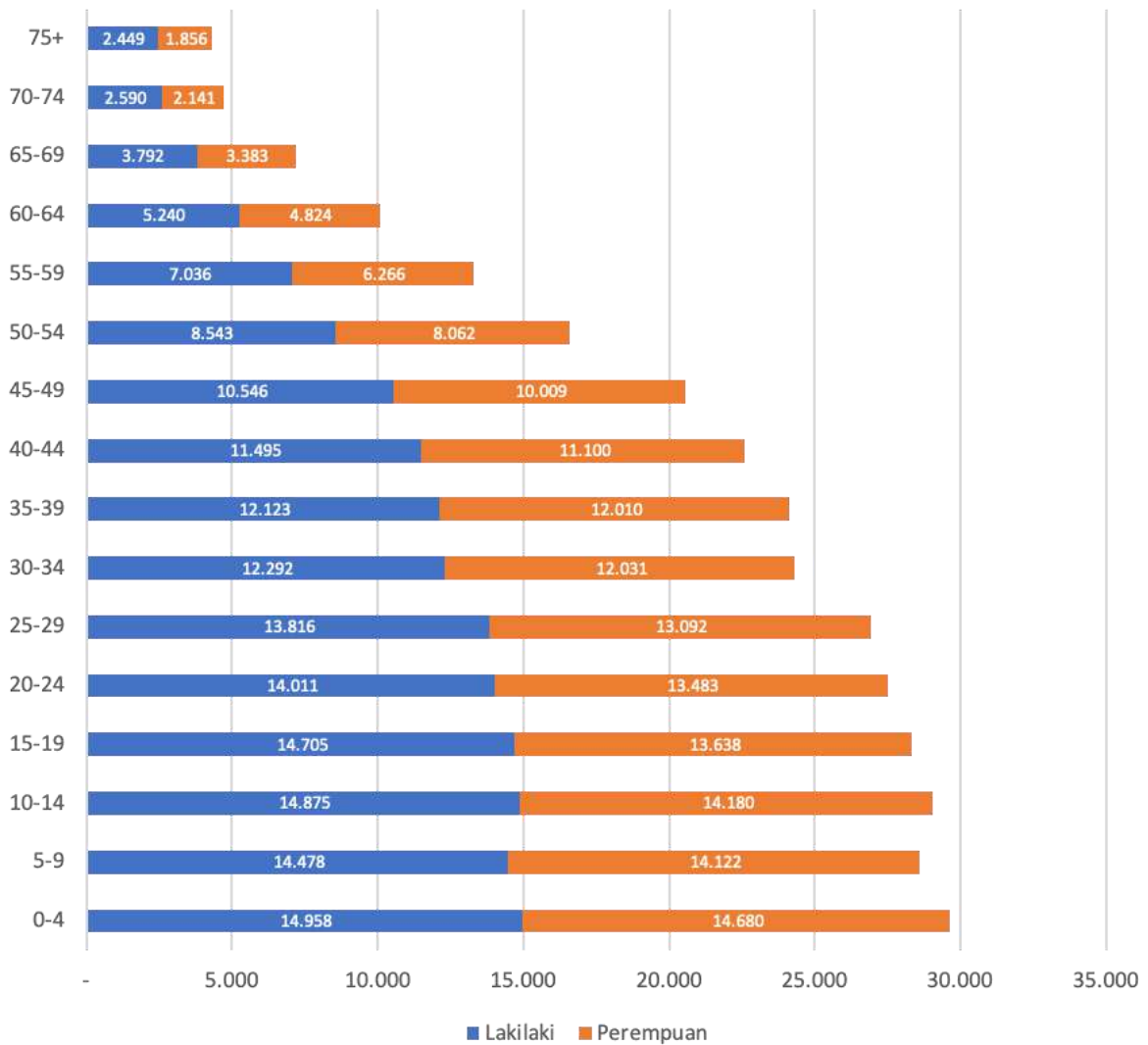
Tabel 2.7. Persentase dan Kepadatan Penduduk per Km² Menurut Kecamatan di Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2023

NO	KECAMATAN	PERSENTASE	KEPADATAN
1	Tinanggea	8,01	81,49
2	Lalembuu	5,07	111,67
3	Andoolo	3,45	94,80
4	Buke	4,69	84,40
5	Andoolo Barat	2,79	113,99
6	Palangga	4,82	90,46
7	Palangga Selatan	2,44	73,88
8	Baito	2,98	63,90
9	Lainea	3,24	51,35
10	Laeya	6,00	82,39
11	Kolono	3,74	35,76
12	Kolono Timur	1,79	46,59
13	Laonti	3,62	31,58
14	Moramo	5,01	64,20
15	Moramo Utara	3,04	61,98
16	Konda	7,01	179,52
17	Wolasi	1,85	38,00
18	Ranomeeto	6,43	232,41
19	Ranomeeto Barat	2,65	123,92
20	Landono	2,92	86,82
21	Mowila	4,38	116,20
22	Sabulakoa	1,67	81,80
23	Angata	5,59	61,87
24	Benua	3,42	83,34
25	Basala	2,38	158,73
	KONAWE SELATAN	100,00	76,88

Sumber: Konawe Selatan dalam Angka 2024

Dari data terlihat persentase kepadatan penduduk tertinggi berada di kecamatan Tinanggea (8,01%), dan terendah di Kecamatan Sabulakoa (1,67%). Ketika dibandingkan dengan luas area, Ranomeeto merupakan kecamatan dengan penduduk terpadat yakni 232,41 jiwa per km². Sementara yang terlejang adalah Kecamatan Laonti dengan penduduk 31,58 jiwa per km². Untuk sebaran penduduk menurut kelompok usia, tersaji dalam Grafi berikut ini.

Grafik 2.2. Sebaran Penduduk Menurut Kelompok Usia di Kabupaten Konawe Selatan 2023



Sumber: Konawe Selatan dalam Angka 2024 (diolah)

2.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Secara umum, perekonomian Konawe Selatan dalam kurun waktu lima tahun terakhir terus mengalami perkembangan meskipun cenderung melambat. Meski demikian secara nominal PDRB Kabupaten Konawe Selatan terus mengalami peningkatan baik atas dasar harga konstan maupun atas dasar harga berlaku. PDRB per kapita Konawe Selatan juga menunjukkan peningkatan konsisten dari tahun ke tahun, meski demikian potensi disparitas harga juga membayangi peningkatan pendapatan per kapita masyarakat ditandai oleh selisih antara PDRB per kapita atas dasar harga konstan dan harga berlaku yang relatif besar. Secara agregat, pertumbuhan ekonomi Konawe Selatan mengalami fluktuasi seperti yang tampak dalam tabel berikut.

Tabel 2.8. Perkembangan PDRB Kabupaten Konawe Selatan 2020-2023

Uraian	2020	2021	2022	2023
PDRB ADHK (miliar Rupiah)	8.256,32	8.649,17	9.154,74	9.630,03
PDRB ADHB (miliar Rupiah)	11.823,22	12.654,68	14.536,50	16.452,47
PDRB Per Kapita ADHB (juta Rupiah)	37,03	40,44	45,66	50,81
Pertumbuhan Ekonomi (%)	-2,22	4,76	5,85	5,19

Sumber: Konawe Selatan dalam Angka 2024 (diolah)

**Tabel 2.9. PDRB Kabupaten Konawe Selatan Menurut Lapangan Usaha
Atas Dasar Harga Berlaku (Miliar Rupiah) Tahun 2020-2023**

No	Lapangan Usaha	2020	2021	2022*	2023**
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.352,83	3.558,55	3.759,36	4.240,78
2	Pertambangan dan Penggalian	2.574,17	2.783,41	3.063,22	3.429,93
3	Industri Pengolahan	299,56	327,04	339,71	255,84
4	Pengadaan Listrik dan Gas	2,91	3,17	3,48	3,68
5	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,43	4,62	4,55	4,80
6	Konstruksi	1.200,51	1.412,89	1.547,18	1.684,52
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.155,35	1.257,98	1.442,04	1.647,84
8	Transportasi dan Pergudangan	1.828,86	1.835,05	2.785,34	3.430,47
9	Penyedia Akomodasi dan Makan Minum	29,20	30,96	32,63	35,94
10	Informasi dan Komunikasi	52,17	54,29	55,94	57,92
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	97,94	113,36	129,63	141,40
12	Real Estat	80,89	81,75	82,99	86,84
13	Jasa Perusahaan	1,25	1,32	1,45	1,63
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	483,52	510,65	558,71	626,02
15	Jasa Pendidikan	475,72	482,50	521,98	581,80
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	98,58	106,62	110,79	113,42
17	Jasa Lainnya	85,34	90,51	97,48	109,65
PDRB		11.823,22	12.654,68	14.536,50	16.452,47

Catatan: * Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Sumber: Konawe Selatan dalam Angka 2024

Tabel 2.10. PDRB Kabupaten Konawe Selatan Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan (Miliar Rupiah) Tahun 2020-2023

No	Lapangan Usaha	2020	2021	2022*	2023**
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.287,15	2.379,10	2.436,26	2.623,29
2	Pertambangan dan Penggalian	1.919,30	1.998,71	2.041,89	2.074,11
3	Industri Pengolahan	218,01	227,89	231,84	166,44
4	Pengadaan Listrik dan Gas	2,48	2,64	2,79	2,92
5	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,51	3,65	3,55	3,70
6	Konstruksi	829,87	936,765	967,77	1.017,30
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	801,09	862,86	932,46	1.022,55
8	Transportasi dan Pergudangan	1.165,62	1.176,84	1.413,69	1.515,07
9	Penyedia Akomodasi dan Makan Minum	20,84	21,92	22,66	24,45
10	Informasi dan Komunikasi	52,16	54,45	56,20	59,33
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	67,52	73,61	78,15	83,16
12	Real Estat	64,70	65,28	66,09	67,14
13	Jasa Perusahaan	0,94	0,97	1,01	1,09
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	334,65	348,85	380,47	418,12
15	Jasa Pendidikan	348,57	348,40	365,60	389,81
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	72,89	77,45	80,05	80,50
17	Jasa Lainnya	67,00	69,79	74,27	81,05
PDRB		8.256,32	8.649,17	9.154,74	9.630,03

Catatan: * Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

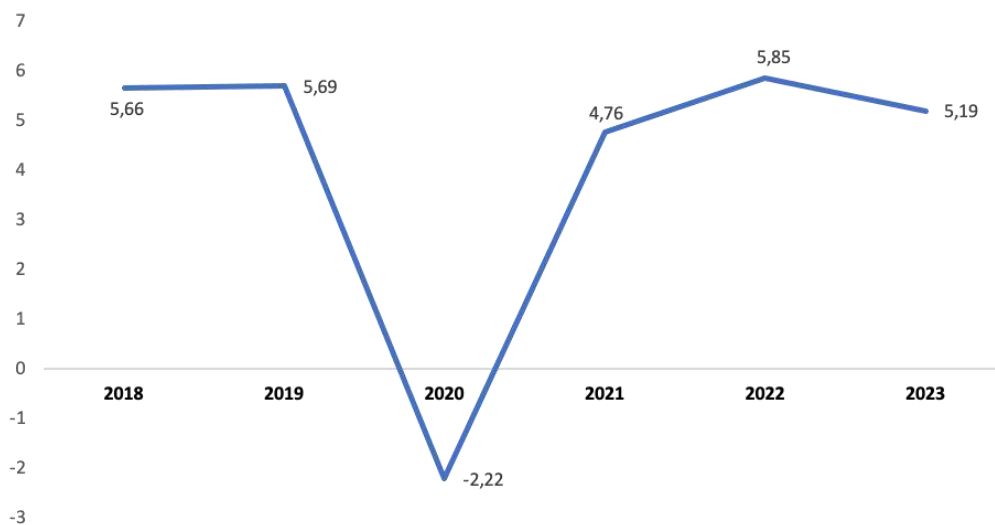
Sumber : BPS Kab. Konawe Selatan 2023

Struktur perekonomian Konawe Selatan ditopang oleh tiga lapangan usaha atau sektor yakni: 1) pertanian; 2) pertambangan dan penggalian; serta 3) transportasi dan pergudangan. Peran ketiga lapangan usaha ini mencapai seperdua dari keseluruhan nilai tambah yang terbentuk di dalam

perekonomian Kabupaten Konawe Selatan. Lapangan usaha lainnya yang memiliki peran penting dalam pembentukan nilai tambah dalam perekonomian Kabupaten Konawe Selatan adalah: 1) perdagangan; 2) konstruksi; serta 3) industri pengolahan.

Awal tahun 2020 perekonomian global, nasional dan regional di seluruh dunia menghadapi tekanan akibat pandemic Covid-19 dan berimplikasi terhadap kinerja perekonomian tiap-tiap daerah termasuk Kabupaten Konawe Selatan. Meski tumbuh tipis pada tahun 2018 dan 2019, perekonomian Konawe Selatan mengalami kontraksi atau tumbuh negatif pada tahun 2020. Namun pada tahun 2021 dan tahun 2022 kinerja perekonomian Konawe Selatan sudah mengalami *recovery*.

Grafik 2.3.
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto
di Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2018-2023 (dalam persen)



Sumber: Konawe Selatan dalam Angka 2024

Aspek lain yang terkait dengan kesejahteraan masyarakat di suatu daerah yakni kondisi kemiskinan. Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. persentase penduduk miskin di Kabupaten Konawe Selatan masih berfluktuasi. Meski demikian, jumlah penduduk miskin terus mengalami peningkatan meski

pernah mengalami penurunan. Pada tahun 2021 jumlah penduduk miskin sekitar 36.170 jiwa (dengan garis kemiskinan sebesar 275.339 rupiah), sementara pada tahun 2022 jumlah penduduk miskin turun ke titik 35.790 jiwa (pada garis kemiskinan sebesar 294.510 rupiah). Meski di tahun 2023 jumlah penduduk miskin Konawe Selatan mengalami peningkatan lagi sekitar 36.840 jiwa (dengan garis kemiskinan sebesar 331.620 rupiah).

Tabel. 2.11.
Garis Kemiskinan dan Penduduk Miskin
di Kabupaten Konawe Selatan, 2019 – 2023

Tahun	Garis Kemiskinan (Rupiah)	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu)	Persentase Penduduk Miskin
2019	235.654	33,89	10,81
2020	261.382	34,22	10,74
2021	275.339	36,17	11,34
2022	294.510	35,79	11,08
2023	331.620	36,84	11,26

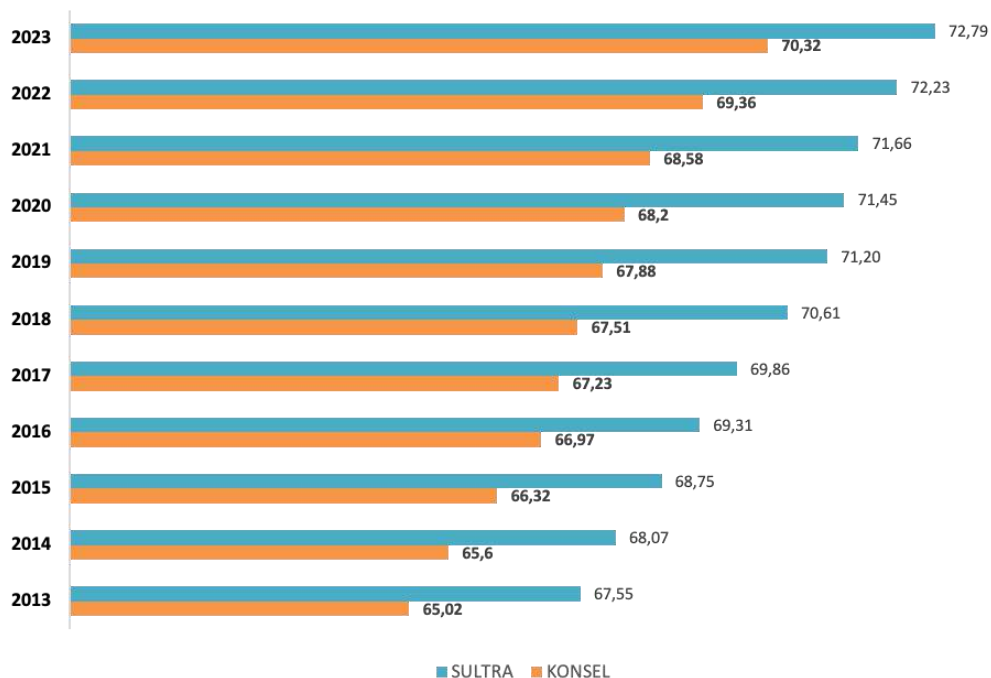
Sumber: Konawe Selatan dalam Angka 2024

Selain isu kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga kerap menjadi rujukan hasil pembangunan masyarakat. IPM merupakan pengukuran perbandingan dari harapan hidup, pendidikan, dan standar hidup atau daya beli masyarakat untuk semua negara. IPM digunakan sebagai indikator untuk menilai aspek kualitas dari pembangunan dan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara termasuk negara maju, negara berkembang, atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijakan ekonomi terhadap kualitas hidup.

IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan

hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standard of living*). Umur panjang dan hidup sehat digambarkan oleh Angka Harapan Hidup saat lahir (AHH) yaitu jumlah tahun yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir untuk hidup, dengan asumsi bahwa pola angka kematian menurut umur pada saat kelahiran sama sepanjang usia bayi. Pengetahuan diukur melalui indikator rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya (tahun) sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu dimasa mendatang. Standarhidup yang layak digambarkan oleh pengeluaran per kapita disesuaikan, yang ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (*purchasing power parity*).

Grafik 2.4. Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Konawe Selatan dan Sulawesi Tenggara Tahun 2013-2023



Sumber: BPS Sulawesi Tenggara 2024 (diolah)

Secara umum, pembangunan manusia Konawe Selatan terus mengalami kemajuan selama periode 2013 hingga 2023. IPM Konawe Selatan meningkat dari 65,02 pada tahun 2013 menjadi 70,32 pada tahun 2023. Walaupun demikian, IPM Konawe Selatan masih berada di bawah IPM Provinsi. Selama periode 2013 hingga 2023, IPM Konawe Selatan menunjukkan kemajuan walaupun masih dengan kategori sedang.

2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

Angka Melek Huruf adalah proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya, tanpa harus mengerti apa yang dibaca/ditulisnya terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas. Grafik berikut menunjukkan persentase melek huruf di Kabupaten Konawe Selatan yang terdistribusi menurut kelompok usia.

Grafik 2.5. Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Melek Huruf Menurut Kelompok Umur di Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2023



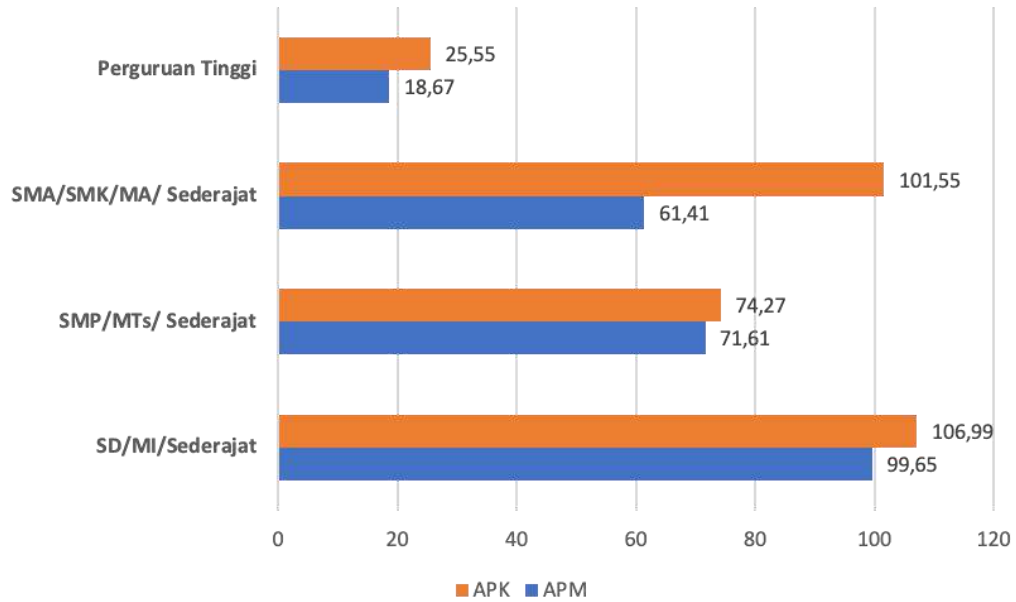
Sumber: Konawe Selatan dalam Angka 2024

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah rasio jumlah siswa, berapa pun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. Sebagai ilustrasi, APK SD sama dengan jumlah siswa yang duduk di bangku SD dibagi dengan jumlah penduduk kelompok usia 7 sampai 12 tahun.

APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Untuk meningkatkan angka partisipasi kasar yang belum mencapai target dapat dilakukan, misalnya dengan menambah fasilitas pendidikan, kemampuan pendidik serta peningkatan anggaran pendidikan yang berasal dari daerah maupun pusat. APK didapat dengan membagi jumlah penduduk yang sedang bersekolah (atau jumlah siswa), tanpa memperhitungkan umur, pada jenjang pendidikan tertentu dengan jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tersebut.

Adapun Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama. APM menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. Seperti APK, APM juga merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan. Tetapi, jika dibandingkan APK, APM merupakan indikator daya serap yang lebih baik karena APM melihat partisipasi penduduk kelompok usia standar di jenjang pendidikan yang sesuai dengan standar tersebut. APM di suatu jenjang pendidikan didapat dengan membagi jumlah siswa atau penduduk usia sekolah yang sedang bersekolah dengan jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang sekolah tersebut. Berikut ini Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Kasar di Konawe Selatan.

Grafik 2.6. Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2023



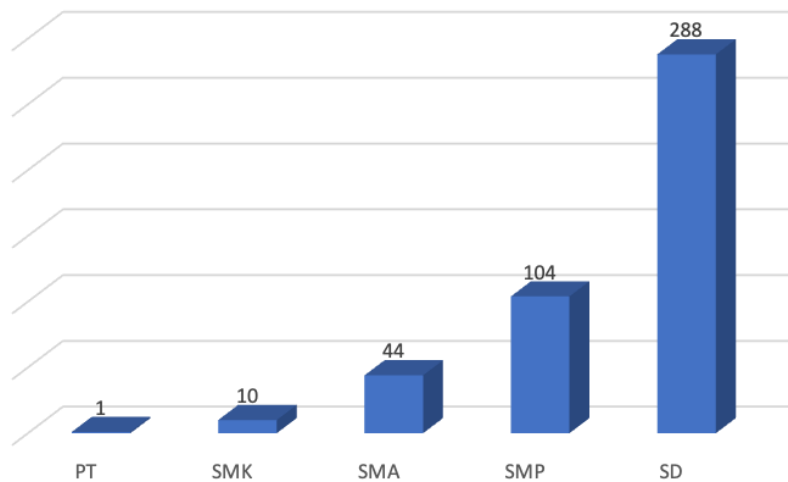
Sumber: Konawe Selatan dalam Angka 2024

Nilai APK yang mendekati atau lebih dari 100 persen menunjukkan bahwa ada penduduk yang sekolah, belum mencukupi umur dan/atau melebihi umur yang seharusnya (tinggal kelas). Pada Grafik 2.6 terlihat Konawe Selatan menampung penduduk usia sekolah lebih dari target yang sesungguhnya untuk tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Atas. Berbeda dengan APK, nilai APM menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai pada jenjang pendidikannya. Angka APM yang mendekati angka 100 menunjukkan bahwa hampir seluruh anak usia Sekolah Dasar (dan yang sederajat), telah mengenyam pendidikan di tingkat ini. Sayangnya, makin tinggi jenjang pendidikan, makin rendah tingkat partisipasi siswa/mahasiswa.

2.3 ASPEK PELAYANAN UMUM

Pendidikan merupakan salah satu aspek layanan umum yang penting. Salah satu kunci pencapaian layanan pendidikan yang berkualitas dapat dilihat dari kondisi ketersediaan fasilitas pendidikan. Grafik berikut menggambarkan jumlah fasilitas pendidikan di Kabupaten Konawe Selatan.

Grafik 2.7.
Fasilitas Pendidikan di Kabupaten Konawe Selatan tahun 2022



Sumber: Konawe Selatan dalam Angka 2024 (diolah)

Selain fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan juga menjadi tulang punggung dan bagian dari layanan dasar yang dibutuhkan masyarakat serta wajib disediakan oleh pemerintah. Tabel berikut menunjukkan fasilitas kesehatan di Kabupaten Konawe Selatan.

Tabel 2.12.
Fasilitas Kesehatan Kabupaten Konawe Selatan
Tahun 2019-2023

FASILITAS DAN TENAGA KESEHATAN	TAHUN				
	2019	2020	2021	2022	2023
Rumah Sakit	1	1	1	1	1
Puskesmas	24	24	25	26	26
Puskesmas Pembantu	54	54	67	51	51
Puskesmas Keliling	19	19	29	31	31
Puskesmas Plus	0	0	0	0	0
Poliklinik Desa	31	31	56	69	69
Pos Pelayanan Terpadu	416	424	411	403	410
Pos Kesehatan Desa	131	131	123	135	135
Fasilitas Kesehatan	676	684	712	716	723

Sumber: Konawe Selatan dalam Angka 2024

Angka Harapan Hidup di Kabupaten Konawe Selatan meningkat setiap tahunnya. Data BPS Sulawesi Tenggara menunjukkan, pada tahun 2021 Angka Harapan Hidup sebesar 70,87 tahun, sementara tahun 2023 telah mencapai 71,02 tahun. Hal ini didukung pula dengan jumlah fasilitas kesehatan yang bertambah 47 unit sejak tahun 2019.

2.4 ASPEK DAYA SAING DAERAH

Hingga tahun 2023, panjang jalan yang menjadi wewenang pemerintah Provinsi di Kabupaten Konawe Selatan adalah sepanjang 176,25 km sementara panjang jalan yang menjadi wewenang pemerintah Kabupaten Konawe Selatan adalah sepanjang 867,17 km. Konektivitas antar wilayah di dalam Kabupaten Konawe Selatan bertumpu pada daya dukung infrastruktur jalan dan jembatan terutama untuk menopang kegiatan transportasi dan rantai pasok ragam barang dan jasa di Konawe Selatan.

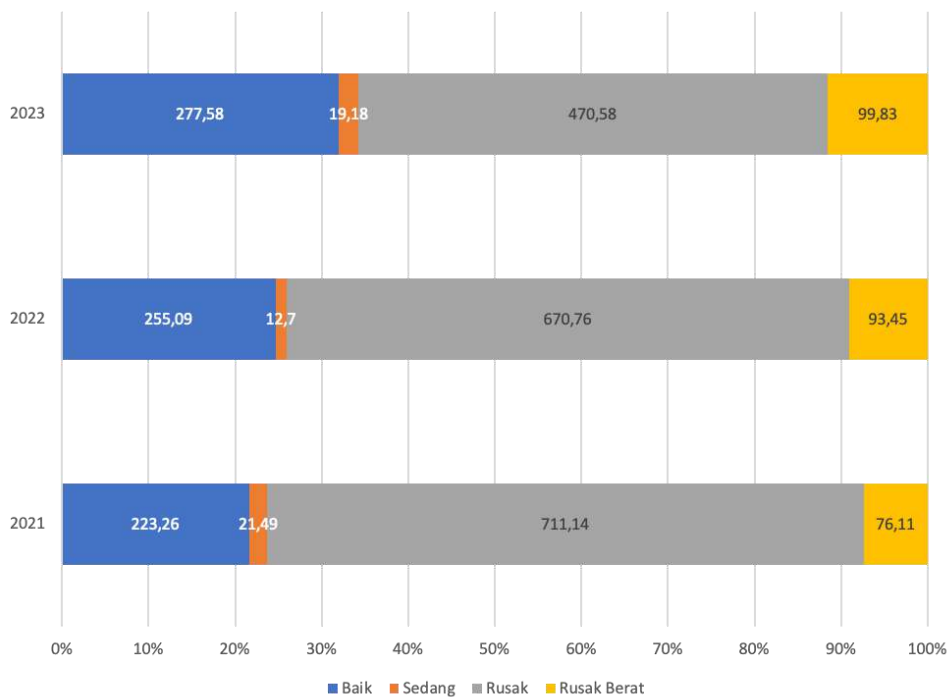
Tabel 2.13. Panjang Jalan Menurut Tingkat Kewenangan Pemerintahan di Kabupaten Konawe Selatan (KM)

Panjang Jalan Menurut Tingkat Kewenangan Pemerintahan	2021	2022	2023
Negara	165,75	186,94	186,94
Provinsi	237,84	237,84	176,25
Kabupaten	1.032,00	1.032,00	867,17
Total	1.435,59	1.456,59	1.230,36

Sumber: Konawe Selatan dalam Angka 2024

Proporsi panjang jalan menurut kondisi jalan pada tahun 2023 di Kabupaten Konawe Selatan adalah 32% dalam kualitas baik, 2% dalam kondisi sedang, 54% jalan rusak, dan 12% dalam keadaan rusak berat.

Grafik 2.8. Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan di Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2021-2023



Sumber: Konawe Selatan dalam Angka 2024

Selain jaringan jalan, infrastruktur penopang konektivitas adalah jembatan. Jumlah jembatan menurut jenis konstruksinya di Kabupaten Konawe Selatan tahun 2023 terdapat 401 unit jembatan dengan total panjang mencapai 3,2 km.

Tabel 2.14. Jumlah dan Panjang Jembatan Berdasarkan Jenis Konstruksinya 2023

Jenis Konstruksi Jembatan	Jumlah Total (unit)	Panjang (meter)
Beton	351	2.756,65
Rangka	-	-
Semi Rangka	-	-
Bailey	7	156,00
Semi Permanen	32	238,10
Kayu	-	-
Darurat	11	55,50
Jumlah	401	3.206,25

Sumber: Konawe Selatan dalam Angka 2024

Selain infrastruktur, kualitas tenaga kerja juga menentukan ragam bidang usaha yang dikerjakan oleh masyarakat. Pencari kerja di Kabupaten Konawe Selatan didominasi oleh luaran Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) yang secara kumulatif hingga tahun 2023 mencapai 1.992 orang tercatat sebagai pencari kerja. Mereka yang berkualifikasi pendidikan sarjana strata satu secara kumulatif hingga tahun 2023 mencapai 370 orang.

Tabel 2.15.
Jumlah Pencari Kerja yang Terdaftar di Kantor Disnaker Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2023

Pendidikan	Sisa 2021	Sisa 2022	Terdaftar 2023
SD	3	264	-
SLTP	17	149	25
SLTA	377	1.190	732
Diploma III	12	70	34
Sarjana/S1	207	248	122
Sarjana/S2	1	-	2
Jumlah	617	1.921	915

Sumber: Konawe Selatan dalam Angka 2024

Berdasarkan lapangan usaha, penduduk Kabupaten Konawe Selatan mayoritas bekerja pada sektor jasa atau mencapai 40,4 persen terhadap total kelompok usia pebekerja di Kabupaten Konawe Selatan pada tahun 2023. Selain pada sektor jasa, penduduk Konawe Selatan yang bekerja juga terkonsentrasi pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan atau mencapai 36,8 persen.

Tabel 2.16.
Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Berdasarkan Lapangan Usaha di Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2023

Lapangan Usaha	Pekerja		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	39.343	19.565	58.908
Industri Pengolahan, Pertambangan dan penggalian, serta Industri Lainnya	29.734	6.781	36.515
Jasa	33.235	31.462	64.697
Jumlah	102.312	57.808	160.120

Sumber: Konawe Selatan dalam Angka 2024

Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) adalah perbandingan antara jumlah penduduk usia produktif, yaitu usia 15-64 tahun dengan jumlah penduduk yang belum/tidak produktif, yaitu penduduk usia 0-14 tahun dan penduduk usia 65 tahun ke atas yang dikalikan 100.

Tabel 2.17.
Rasio Ketergantungan Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2023

VARIABEL	SATUAN	JUMLAH
Jumlah Penduduk Usia < 15 Tahun	Jiwa	88.200
Jumlah Penduduk Usia > 64 Tahun	Jiwa	17.140
Jumlah Penduduk Usia Tidak Produktif	Jiwa	105.340
Jumlah Penduduk Usia Produktif	Jiwa	218.450
Rasio Ketergantungan	Persen	48,22

Sumber: Konawe Selatan dalam Angka 2024 (diolah)

Tabel 2.17 menunjukkan bahwa di Konawe Selatan pada tahun 2023, setiap 100 orang berusia produktif menanggung 48,22 jiwa yang belum/tidak produktif. Semakin tinggi rasio ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif, demikian pula sebaliknya.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Daerah Adi Jaya Putra dan James Adam Mokke sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Periode 2025-2030 berpedeoman kepada Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Konawe Selatan 2025-2029 yang didasarkan pada kondisi obyektif saat ini dan masa lalu serta diprediksi 5 (lima) tahun kedepan ke dalam permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis. Permasalahan pembangunan merupakan kesenjangan antara capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia atau apa yang hendak dicapai dengan kondisi saat ini. Isu strategis merupakan isu strategis dalam konteks global, nasional dan regional yang dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung maupun tidak langsung.

Analisis permasalahan dan isu strategis di Kabupaten Konawe Selatan dengan matra waktu 2025-2029 disusun dengan menggunakan pendekatan eksploratif berbasis data dan informasi yang dihimpun dengan teknik penelusuran dalam jaringan, telaah atas artikel dan dokumen resmi, serta diskusi kelompok terpumpun atau *focus group discussion*, serta melakukan penelusuran berbagai dokumen perencanaan pembangunan RPJPD Kabupaten Konawe Selatan, perencanaan RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara serta RPJP Nasional.

Selain isu pada konteks makro diatas, pada tingkatan mikro juga terdapat perubahan-perubahan perilaku dan preferensi individu dan rumah tangga mencakup antara lain: (i). preferensi atas barang publik berkualitas; (ii). kemudahan akses terhadap layanan publik; (iii). tingginya perilaku komuter; (iv). kesadaran daring dan nontunai; (v). akses terhadap pangan murah dan berkualitas; (vi). akses terhadap air bersih. (vii). pendidikan dan pelatihan berkualitas; dan (viii). *asset awareness*. Oleh karenanya periode pembangunan jangka menengah 2025-2029 Kabupaten Konawe Selatan perlu secara cepat mengafirmasi ragam perkembangan pada aras makro dan mikro diatas dengan melakukan transformasi perencanaan pembangunan yang tidak sekedar mencapai derajat ketersediaan dan kecukupan namun secara detail telah menyertakan aspek kualitas - kebermanfaatn (*beneficiary*) bagi masyarakat Kabupaten Konawe Selatan. Uraian permasalahan dan isu strategis pembangunan jangka menengah Kabupaten Konawe Selatan sebagai berikut:

3.1. Permasalahan Pembangunan

3.1.1. Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar

Urusan Pendidikan

Urusan sektor pendidikan bagi daerah yaitu menciptakan ketersediaan dan jaminan terhadap kualitas sumber daya manusia (SDM). Kualitas pendidikan yang baik akan melahirkan SDM yang berkualitas pula. Tanpa dukungan SDM memadai akan terjadi ketidakmampuan dalam menjalankan investasi di berbagai sektor perekonomian dan sebagai akibatnya pertumbuhan ekonomi tidak akan tercapai secara berkelanjutan. Secara umum, permasalahan dalam urusan pendidikan di Kabupaten Konawe Selatan adalah akses dan pelayanan pendidikan yang belum merata dan berkualitas yang disebabkan sarana dan prasarana penunjang pendidikan yang masih terbatas, serta capaian mutu pendidikan yang belum maksimal. Secara terperinci permasalahan tersebut antarlain:

- a. Masih terdapatnya tenaga pendidik yang belum memiliki kualifikasi pendidikan S1/D4 sehingga berimplikasi terhadap kompetensi kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memadai.
- b. Masih terdapat penduduk usia sekolah yang belum bersekolah serta relatif tingginya angka Putus Sekolah (APS).
- c. Ketersediaan fasilitas sarana dan prasarana pendidikan terbatas dan belum merata.
- d. Tenaga pendidik/guru belum terdistribusi secara merata sehingga terjadi kesenjangan mutu/kualitas antar sekolah dan daerah.
- e. Masih terdapat permasalahan legalitas kepemilikan lahan dan kualitas gedung sekolah.

Urusan Kesehatan

Aspek kesehatan memiliki peran penting dalam menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Kualitas SDM yang dimiliki daerah akan berimplikasi terhadap kesejahteraan sosial masyarakat. Berbagai permasalahan kesehatan yang masih dihadapi di Kabupaten Konawe Selatan antara lain:

- a. Belum optimalnya program penanganan masalah Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) yang ditandai dengan masih tingginya Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Balita (AKABA).
- b. Masih terdapat kasus gizi kurang, gizi buruk (*malnutrition*) dan stunting.
- c. Kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan rendah dan pemerataan/distribusi tenaga kesehatan belum proporsional.
- d. Belum memadainya tenaga kesehatan khususnya dokter spesialis sehingga masih sangat tergantung dengan dokter dari Kota Kendari dengan sistem sewa jasa.
- e. Masih tingginya angka kesakitan pada penyakit menular dan ada kecenderungan meningkatnya angka kesakitan pada penyakit tidak menular.
- f. Sanitasi lingkungan permukiman masih buruk dan belum tertata dengan baik.

Urusan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Seperti daerah otonomi baru lainnya secara umum, permasalahan dalam urusan yang berkaitan dengan pekerjaan umum di Kabupaten Konawe Selatan adalah ketersediaan infrastruktur jalan dalam kondisi mantap yang masih sangat terbatas, ketersediaan sarana air bersih, sarana dan prasarana irigasi. Sementara itu, permasalahan penataan ruang wilayah terutama terkait belum adanya kepastian pemanfaatan dan pengendalian ruang Kabupaten Konawe Selatan berikut ketersediaan dokumen penataan ruang wilayah. Permasalahan spesifik lainnya adalah penurunan luas kawasan hutan dan terjadinya perubahan pemanfaatan/alih fungsi penggunaan lahan.

Agenda utama sektor pekerjaan umum dan penataan ruang di Kabupaten Konawe Selatan pada 2025-2045 adalah pemantapan kondisi infrastruktur dasar seperti jaringan jalan, jembatan, drainase, irigasi, sanitasi, air bersih, sarana pengolahan sampah dan penata kelolaan ruang darat bagi aktivitas sosial dan perekonomian masyarakat, pemantapan kondisi infrastruktur dasar ini juga berkaitan dengan kemampuan infrastruktur untuk mendorong peningkatan nilai tambah bagi perekonomian Kabupaten Konawe Selatan dan merupakan syarat perlu bagi transformasi struktur ekonomi, keberlangsungan dan keberlanjutan pembangunan. Secara terperinci permasalahan tersebut diuraikan sebagai berikut: Masih terdapat aktivitas pembangunan belum berbasis tata ruang.

- a. Masih sering terjadi konflik kepemilikan lahan antara pemerintah, masyarakat dan dan pelaku usaha/investor.
- b. Masih terdapat lahan atau ruang yang belum dimanfaatkan secara optimal.
- c. Masih terdapat jalan, jembatan, drainase dan irigasi dalam kondisi yang belum mantap.
- d. Belum optimalnya penataan sungai, pantai dan talud.
- e. Pemenuhan infrastruktur perkotaan (air bersih dan sarana pengolahan sampah) belum tersedia secara optimal

Urusan Perumahan Rakyat dan Permukiman

Salah satu kebutuhan dasar dalam menunjang aktivitas dan interaksi social manusia adalah kebutuhan akan perumahan dan permukiman. Karena itu, pemerintah daerah wajib memberikan akses kepada masyarakat untuk dapat memperoleh permukiman yang layak huni, sejahtera, berbudaya, dan berkeadilan sosial. Pengembangan kawasan permukiman suatu daerah pada hakekatnya untuk mewujudkan kondisi permukiman yang layak huni (*livible*), aman, nyaman, damai dan sejahtera serta berkelanjutan. Program dan kegiatan utama di daerah antara lain meliputi pembangunan prasarana dan sarana dasar, pembangunan permukiman yang terjangkau, khususnya bagi masyarakatberpenghasilan rendah, penyelenggaraan lahan, pengembangan ekonomi daerah serta penciptaan lapangan kerja di daerah.

Permasalahan perumahan dan permukiman di wilayah Kabupaten Konawe Selatan terkait dengan kondisi beberapa kawasan permukiman dan perumahan penduduk yang masih berada di bawah standar yang telah ditetapkan. Kondisi tersebut, terutama disebabkan oleh pertumbuhan penduduk dan rumah tangga yang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, penataan permukiman yang belum terpola. Permasalahan tersebut diurai sebagai berikut:

- a. Masih terdapat rumah penduduk dengan kondisi tidak layak huni, aman, nyaman dan berkelanjutan.
- b. Belum optimalnya pemenuhan air minum dan sanitasi serta ketersediaan fasilitas umum dalam mewujudkan pemukiman yang sehat dan aman.

Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Sebagai upaya untuk menyediakan ruang bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka faktor ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat menjadi keniscayaan yang harus diwujudkan. Secara kualitatif, permasalahan-permasalahan yang berkembang pada urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Konawe Selatan adalah:

- a. Belum optimalnya penegakan dan penanganan pelanggaran Perda/Perkada yang disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dan penanganan pelanggaran Perda/Perkada yang belum menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Konawe Selatan, serta ketaatan atau kesadaran hukum masyarakat yang relatif rendah.
- b. Kurangnya kegiatan pengawasan/patrol yang dilaksanakan oleh Satpol PP dan belum menjangkau seluruh wilayah Kab. Konawe Selatan.
- c. Terbatasnya jumlah personil/anggota Sat Pol PP sehingga pelayanan belum maksimal.
- d. Belum optimalnya kesadaran masyarakat dalam penyelenggaraan ketertiban umum masyarakat terutama di daerah perbatasan atau pinggiran.

Urusan Sosial

Masalah kesejahteraan sosial mengacu pada masalah-masalah di dalam masyarakat yang menyulitkan masyarakat untuk mencapai potensi penuh mereka. Masalah-masalah ini dapat mempengaruhi kesejahteraan individu dan keluarga, dan dapat mencakup kemiskinan, pengangguran, ketidaksetaraan kesempatan, kekurangan gizi, perumahan di bawah standar, diskriminasi dalam pekerjaan, pelecehan terhadap anak, penelantaran, kriminalitas, dan penyalahgunaan narkoba. Berikut permasalahan urusan sosial di Kabupaten Konawe Selatan yang diidentifikasi:

- a. Belum optimalnya penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
- b. Belum maksimalnya penanganan korban bencana alam dan non alam.
- c. Terbatasnya sarana dan prasarana tanggap darurat bencana.

- d. Masih terbatasnya jaminan sosial yang diberikan kepada penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia.
- e. Masih rendahnya kapasitas SDM Bidang Kesejahteraan Sosial.

3.1.2. Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar

Urusan Tenaga Kerja

Isu ketenagakerjaan merupakan hal yang signifikan dan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat. Perkembangan isu ketenagakerjaan dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang kompleks dan saling terkait. Untuk dapat membaca kecenderungan di masa depan, banyak faktor yang harus diperhatikan, antara lain perubahan demografis. Berikut permasalahan urusan ketenagakerjaan di Kabupaten Konawe Selatan:

- a. Rendahnya pengetahuan dan kompetensi tenaga kerja lokal yang berimplikasi pada persaingan perekrutan tenaga kerja.
- b. Belum maksimalnya mutu dan produktivitas tenaga kerja yang dapat dilihat dari tingginya pengangguran terdidik dan pekerja sektor informal
- c. Terjadinya migrasi tenaga kerja akibat perubahan penggunaan lahan pertanian dan lahan transmigrasi.

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Ketimpangan gender di Sulawesi Tenggara selama lima tahun terakhir secara konsisten menurun. Data yang dirilis Badan Pusat Statistik Sulawesi Tenggara menunjukkan, Sejak tahun 2018, Indeks Ketimpangan Gender (IKG) berkurang sebesar 0,085 poin, rata-rata turun 0,01 poin per tahun, kecuali tahun 2021 ke 2022 turun sebesar 0,06 poin. Hal ini mengindikasikan ketimpangan gender yang semakin mengecil atau kesetaraan yang semakin membaik. Ditahun 2022, IKG Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar 0,490. Fenomena ketimpangan gender masih menjadi masalah di Konawe Selatan, yang selanjutnya diuraikan sebagai berikut:.

- a. Capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Konawe Selatan belum mencapai target nasional.
- b. Masih terdapat kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- c. Implementasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) dan kelembagaan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) belum optimal.
- d. Minimnya akses dan kesempatan kerja bagi perempuan dalam pemberdayaan ekonomi.

Urusan Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan menjadi salah satu aspek penting dalam menjaga keberlanjutan pembangunan suatu wilayah. Ketahanan pangan di Kabupaten Konawe Selatan masih diperhadapkan pada kecenderungan penurunan produktivitas komoditas pangan utama yang dihasilkan. Hal tersebut utamanya disebabkan oleh pengelolaan potensi lahan pangan, khususnya padi sawah yang belum optimal. Belum optimalnya pengelolaan lahan pangan di daerah ini terutama disebabkan oleh ketersediaan sarana dan prasarana produksi yang masih sangat terbatas, kondisi sosial budaya masyarakat, dan sarana serta prasarana pendukungnya. Permasalahan tersebut diuraikan sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya diversifikasi pola pangan harapan. Ketersediaan cadangan pangan masih riskan diakibatkan tata niaga yang sulit dikendalikan.
- b. Masih terdapat wilayah/daerah rawan pangan.
- c. Kuantitas dan kualitas tenaga penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan masih belum seperti harapan.
- d. Sistem pengelolaan cadangan pangan belum berjalan dengan baik.
- e. Pemahaman masyarakat terhadap ketahanan pangan masih rendah
- f. Belum adanya integrasi dan kolaborasi yang berkelanjutan berbagai program dan kegiatan yang bermuara pada pembangunan ketahanan pangan

Urusan Pertanahan

Masalah pertanahan menjadi faktor yang menunjang berbagai aktivitas pembangunan lainnya apalagi dalam posisinya sebagai daerah otonomi baru yang sudah barang tentu membutuhkan tanah untuk lokasi atau lahan pembangunan berbagai infrastruktur, sarana dan prasarana pemerintahan, jalan, pendidikan, kesehatan, pelayanan publik serta fasilitas umum lainnya. Karena itu, ketersediaan tanah untuk pembangunan berbagai infrastruktur, sarana dan prasarana tersebut merupakan sebuah keniscayaan. Namun di sisi lain, kebutuhan tanah sebagaimana dikemukakan di atas, masih dihadapkan oleh berbagai permasalahan. Permasalahan utama terkait dengan urusan pertanahan di Kabupaten Konawe Selatan adalah

- a. Masih banyak lahan/tanah pemerintah daerah Konawe Selatan yang belum memiliki legal formal/sertifikasi.
- b. Masih belum optimalnya penanganan sengketa tanah milik pemerintah daerah Konawe Selatan dengan masyarakat.

Urusan Kebencanaan

Urusan kebencanaan menjadi hal penting bagi daerah yang tidak hanya pada bencana alam tetapi juga bencana non alam. Secara spesifik permasalahan kebencanaan di Kabupaten Konawe Selatan sebagai berikut:

- a. Belum terbangunnya sistem penanggulangan bencana di Kabupaten Konawe Selatan
- b. Keterbatasan SDM dan sarana prasarana pendukung yang memadai dan merata dalam mitigasi dan penanganan bencana.

Urusan Lingkungan Hidup

Eksistensi dan peranan Lingkungan hidup sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan mahluk hidup, sangat vital dan strategis. Hal ini disebabkan oleh peranannya dalam mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta mahluk hidup lainnya. Karena itu, pembangunan di bidang apapun, mestinya memperhatikan kaidah-kaidah dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup. Pelestarian lingkungan hidup diartikan sebagai usaha yang dilakukan manusia agar sumber daya alam yang dibutuhkan mampu melayani kebutuhan manusia, namun tidak mengalami kerusakan atau

cepat habis. Dalam usaha menjamin kelestarian lingkungan hidup, maka sangat penting untuk memadukan prinsip-prinsip pembangunan yang berkesinambungan dalam kebijakan serta mengurangi degradasi lingkungan.

Berkaitan dengan lingkungan hidup, maka permasalahan yang berkembang di Kabupaten Konawe Selatan adalah

- a. Konversi lahan hutan ke lahan pertanian dan lahan terbuka menyebabkan menurunnya fungsi imbuhan air tanah di wilayah tangkapan air utama atau daerah aliran sungai.
- b. Konversi lahan pertanian ke lahan terbangun menyebabkan menurunnya luas lahan pertanian yang berpotensi pada menurunnya tingkat produksi pertanian.
- c. Menurunnya daya tampung dan daya dukung Lingkungan.
- d. Meningkatnya kuantitas sampah domestik menyebabkan rawan terjadinya penumpukan sampah secara tidak terkendali.
- e. Masih lemahnya pengawasan, penataan dan pengelolaan terhadap usaha/ kegiatan yang memiliki dampak terhadap kerusakan lingkungan.
- f. Berkurangnya sumber air minum dan air pertanian.
- g. Belum optimalnya pengelolaan daerah sumber air dan daerah penyangga.
- h. Belum adanya kebijakan yang sinergis dalam pengelolaan persampahan yang dalam skala regional.

Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Sejalan dengan arah penyelenggaraan administrasi kependudukan, maka pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebagai sub-sub sistem pilar administrasi kependudukan harus ditata dengan baik agar memberikan manfaat dalam perbaikan pemerintahan dan pembangunan. Oleh karena itu, pengelolaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil harus diselenggarakan sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan daerah.

Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menegaskan bahwa pengelolaan kependudukan untuk wilayah kabupaten/kota adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang berwenang memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap penduduk atas pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting. Dalam menjalankan

penyelenggaraan administrasi kependudukan, maka peristiwa penting kependudukan yang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak dan lain-lain yang harus dicatat ke dalam pencatatan sipil harus ditata dengan sebaik-baiknya dalam bentuk pelayanan publik kepada masyarakat. Permasalahan yang berkaitan dengan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Konawe Selatan adalah:

- a. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas SDM aparatur pengelola SIAK yang tidak merata.
- b. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk kepemilikan kelengkapan dokumen kependudukan (KK, KTP dan Akta Catatan Sipil)
- c. Ketersediaan database kependudukan yang belum akurat, valid dan terupdate secara berkala.

Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, melalui beberapa program dan kegiatan antara lain peningkatan prakarsa dan swadaya masyarakat, perbaikan lingkungan dan perumahan, pengembangan usaha ekonomi desa, pengembangan Lembaga Keuangan Desa, serta kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menaikkan hasil produksinya merupakan contoh kecil dari aspek-aspek yang berkaitan dengan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa. Memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat bawah (*grass root*), yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain, pemberdayaan (*empowering*) adalah memampukan dan memandirikan masyarakat miskin. Upaya pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Konawe Selatan memiliki korelasi yang kuat dengan tingkat kemiskinan, dimana Konawe Selatan memiliki tingkat kemiskinan yang masih tinggi. Berikut permasalahan terkait pemberdayaan masyarakat desa di Kabupaten Konawe Selatan sebagai berikut:

- a. Masih tingginya jumlah penduduk miskin desa yang membutuhkan intervensi pemberdayaan.
- b. Masih terdapat desa dengan status desa tertinggal.
- c. Belum optimalnya pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan desa serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa
- d. Belum terwujudnya secara optimal pembangunan desa terpadu melalui pengembangan desa mandiri, peningkatan kualitas kelembagaan dan kualitas aparatur desa.
- e. Belum optimalnya lembaga keuangan mikro di desa (BUMDES dan KUD) yang belum berperan aktif dan dalam memberikan kontribusi positif dalam penyediaan serta memfasilitasi modal usaha di desa.
- f. Belum tercapainya Standar Pelayanan Minimal (SPM) desa sesuai dengan Permendagri Nomor 2 tahun 2017 tentang SPM Desa.
- g. Belum tercapainya Standarisasi Operasional Prosedur pemerintahan desa yang efektif dan efisien (Jumlah SOP masih kurang),
- h. Belum menerapkan sistem informasi pemerintahan desa yang berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- i. Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat masih rendah.
- j. Komitmen dan tanggung jawab masyarakat dalam pemeliharaan dan pelestarian pasca program masih rendah.

Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga telah mengamanatkan bahwa, penduduk harus menjadi titik sentral dalam pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan terencana di segala bidang untuk menciptakan perbandingan ideal antara perkembangan kependudukan dengan daya dukung lingkungan serta memenuhi kebutuhan generasi sekarang dan berkeadilan bagi generasi selanjutnya.

Permasalahan kependudukan dan keluarga berencana secara umum adalah masih tingginya laju pertumbuhan penduduk paling tidak dalam kurun waktu satu dasawarsa terakhir. Tingginya laju pertumbuhan penduduk, tidak sebanding dengan peningkatan kualitas penduduk ditandai dengan angka rata-rata lama sekolah, derajat kesehatan dan indeks pembangunan manusia (IPM) yang masih rendah, baik nasional maupun di daerah. Tingginya laju pertumbuhan penduduk juga berimplikasi terhadap meningkatnya angka pengangguran terbuka, penyediaan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha serta dampak sosial dan ekonomi lainnya.

Adapun permasalahan dan tantangan pada urusan kependudukan dan keluarga berencana di Kabupaten Konawe Selatan adalah

- a. Belum maksimalnya cakupan peserta KB aktif di Kabupaten Konawe Selatan.
- b. Belum optimalnya pengadaan alat kontrasepsi yang diadakan oleh pemerintah pusat sehingga pemerintah daerah perlu melakukan pendampingan pengadaan alat kontrasepsi.

Urusan Perhubungan

Pembangunan infrastruktur jaringan transportasi mempunyai peran penting dalam mendukung dan menunjang pembangunan di bidang lainnya. Peningkatan aksesibilitas, keterjangkauan maupun konektivitas infrastruktur transportasi dapat lebih mempererat dukungan antar wilayah dalam suatu daerah, maupun pemerataan pembangunan wilayah. Transportasi juga dapat mendukung percepatan pembangunan daerah, sebagai penghubung antar wilayah maupun sebagai titik simpul distribusi. Pola jaringan transportasi yang baik akan mempengaruhi perkembangan kota dan wilayah yang direncanakan sesuai dengan rencana tata guna lahan. Berkenaan dengan urusan terkait perhubungan di Kabupaten Konawe Selatan, maka masalah yang masih dihadapi adalah:

- a. Moda transportasi umum dalam daerah belum dikelola dengan baik.
- b. Terminal yang dibangun belum berfungsi sesuai yang diharapkan.
- c. Kualitas jalan kewenangan kabupaten masih sangat rendah.
- d. Masih kurang jalan alternatif sebagai penghubung antar wilayah dan kawasan

Urusan Komunikasi dan Informatika

Geliat dan perkembangan dunia di bidang komunikasi dan informatika telah mendatangkan sebuah dinamika baru yang secara langsung memberi dampak terhadap peradaban manusia secara umum. Dampak tersebut telah memberikan perubahan mendasar manusia terhadap kebutuhan informasi dan teknologi telekomunikasi. Adanya perkembangan teknologi telekomunikasi dengan berbagai bentuk sistem informasi yang kian beragam membuka ruang persaingan yang semakin ketat antar operator yang bergerak di bidang telematika dan berujung pada pembentukan pasar persaingan sempurna. Menyikapi gerak dan arus informasi yang begitu cepat maka Konawe Selatan mesti beradaptasi dan melakukan percepatan pemanfaatan teknologi informatika. Uraian permasalahan terkait urusan komunikasi dan informatika sebagai berikut:

- a. Cakupan jaringan telekomunikasi di pedesaan belum memadai.
- b. Belum optimalnya jaringan komunikasi antar perangkat daerah dan pengembangan website pemerintah daerah kabupaten Konawe Selatan.
- c. Belum optimalnya sumber daya aparatur penyelenggara informasi dan komunikasi.
- d. Belum optimalnya pembentukan dan pengembangan jaringan kerjasama informasi dan komunikasi untuk mendukung penyampaian informasi kepada masyarakat.

Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Koperasi, usaha kecil dan menengah (UKM) adalah tulang punggung perekonomian masyarakat dan menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan untuk menanggulangi berbagai keterbelakangan yang berkaitan dengan urusan ini. Karena itu, peran koperasi dan UKM diharapkan dapat mendorong penciptaan lapangan kerja dan kesempatan berusaha, peningkatan pendapatan dan penanggulangan kemiskinan. Posisi dan peran koperasi dan UKM tersebut, belum dapat diwujudkan oleh karena masih terkendala berbagai permasalahan antara lain:

- a. Koperasi dan lembaga UMKM masih tergantung dengan bantuan pemerintah.
- b. Belum optimalnya peningkatan kualitas kewirausahaan (*entrepreneurship*) masyarakat pengusaha kecil, mikro dan menengah
- c. Akses pasar produk UKM belum ada
- d. Kualitas SDM pengelola UKM masih rendah
- e. Akses permodalan untuk UKM masih kurang.
- f. Rendahnya kesadaran UKM untuk mengurus izin usaha (berbadan hukum)
- g. Proporsi koperasi sehat masih sangat rendah.
- h. Pembinaan ekonomi kreatif masih perlu dilakukan.

Urusan Penanaman Modal

Dari aspek penanaman modal, arah investasi di Kabupaten Konawe Selatan belum menciptakan nilai tambah ekonomi pada sektor unggulan daerah yang meliputi sektor pertanian, perkebunan, sektor perikanan, sektor pariwisata maupun energi terbarukan. Di lain sisi tantangan dan permasalahan penanaman modal di Kabupaten Konawe Selatan masih diperhadapkan pada ketersediaan infrastruktur pendukung kegiatan investasi. Aspek ketersediaan data dan informasi yang terinci dan akurat terkait potensi dan realisasi investasi juga masih sangat terbatas. Pada sektor pertambangan dan energi, masalah utama yang dihadapi adalah pemanfaatan lahan yang belum terkendali, tumpang tindih penggunaan kawasan yang berpotensi menimbulkan konflik ekonomi dan sosial. Secara terperinci permasalahan penanaman modal di Kabupaten Konawe Selatan sebagai berikut:

- a. Rendahnya realisasi investasi di daerah yang diakibatkan belum optimalnya promosi dan daya tarik investasi serta kerjasama investasi.
- b. Belum tersedianya data dan informasi investasi yang diwujudkan dalam peta potensi investasi di Konawe Selatan.
- c. Belum optimalnya pelayanan perizinan usaha, dukungan regulasi dan kepastian hukum.
- d. Dukungan infrastruktur untuk mendukung investasi daerah masih minim (jaringan jalan, jembatan, listrik, komunikasi, perbankan, dll).
- e. Pengembangan investasi kurang memperhatikan daya dukung lingkungan.
- f. Nilai manfaat pengembangan investasi terhadap masyarakat masih rendah.
- g. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui pemanfaatan sumberdaya lokal

dalam upaya peningkatan daya saing daerah dan investasi daerah belum berjalan optimal.

Urusan Pemuda dan Olahraga

Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, pembangunan yang terkait dengan urusan kepemudaan dan olahraga di Kabupaten Konawe Selatan sudah mengalami perubahan yang berarti. Hal tersebut dapat dilihat dari keikutsertaan berbagai event, baik pada level regional maupun nasional. Namun alokasi pendanaan yang minim dalam belanja APBD Kabupaten Konawe Selatan terkait pembinaan kalangan generasi muda masih menjadi problem dalam urusan ini. Secara terperinci dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya pembinaan terhadap organisasi kepemudaan.
- b. Belum optimalnya pembinaan dan pengembangan keolahragaan secara berjenjang.
- c. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana olahraga untuk menyelenggarakan kegiatan olahraga baik tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi.
- d. Kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana olahraga.

Urusan Kebudayaan

Pembangunan bidang kebudayaan di Kabupaten Konawe Selatan adalah bagaimana memberikan jaminan akan tetap terpeliharanya tradisi dan nilai-nilai budaya serta kearifan lokal dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, baik secara lokalitas, nasional, maupun internasional. Adapun uraian terkait permasalahan urusan kebudayaan di Kabupaten Konawe Selatan antara lain:

- a. Kegiatan kebudayaan daerah belum mendapat penanganan yang serius.
- b. Belum optimalnya penyelenggaraan festival seni dan budaya di kabupaten Konawe Selatan.
- c. Belum optimalnya pengelolaan cagar budaya daerah menjadi objek wisata.
- d. Pelestarian cagar budaya daerah belum dilakukan secara optimal.
- e. Menurunnya minat generasi muda dalam melestarikan seni dan budaya lokal.

Urusan Perpustakaan

Perpustakaan memegang peran penting dalam pembangunan literasi masyarakat yang dilihat dari rasio ketersediaan perpustakaan umum, perpustakaan sekolah dan perpustakaan perguruan tinggi. Demikian pula persentase perpustakaan dipersepsi dalam memenuhi Standar Nasional Perpustakaan (SNP) melalui rasio kecukupan koleksi berdasarkan IFLA/UNESCO. IFLA (*International Federation of Library Associations and Institutions*) adalah lembaga internasional untuk mengembangkan perpustakaan dan layanan perpustakaan berkualitas tinggi bagi penggunaannya. Sementara UNESCO (*United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization*) merupakan organisasi Internasional yang bergerak pada bidang pendidikan, ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Karena itu Konawe Selatan mesti memenuhi standar tersebut. Adapun uraian permasalahan dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Sumber daya manusia pengelolaan perpustakaan yang masih rendah secara kualitas dan kuantitas
- b. Belum tersedianya *Electronic Library*.
- c. Masih rendahnya minat baca masyarakat, dilihat dari jumlah pengunjung tidak sebanding dengan jumlah penduduk kabupaten Konawe Selatan.
- d. Belum optimalnya sarana dan prasarana perpustakaan daerah.
- e. Masih kurangnya layanan perpustakaan keliling yang menjangkau seluruh wilayah kabupaten Konawe Selatan.

Urusan Kearsipan

Pengelolaan arsip daerah merupakan kebutuhan yang juga seringkali sangat kurang mendapat perhatian. Padahal, kearsipan membantu dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan dan institusi. Mereka berfungsi sebagai bukti yang dapat digunakan untuk memeriksa tindakan dan keputusan pemerintah serta organisasi non-pemerintah, sehingga mengurangi risiko penyalahgunaan kekuasaan. Kearsipan juga menyediakan data historis yang berharga yang dapat digunakan oleh pengambil keputusan dalam perencanaan dan pengembangan kebijakan. Data historis ini dapat membantu dalam memahami dampak kebijakan masa lalu dan merancang kebijakan yang lebih baik untuk masa depan.

Demikian pula urusan kearsipan di Kabupaten Konawe Selatan yang lembaganya masih baru tentu membutuhkan berbagai penyempurnaan baik dalam sarana dan fasilitas yang dibutuhkan maupun terhadap para pengelola kearsipan. Kurangnya perhatian terhadap kearsipan di daerah ini dapat mengakibatkan penataan arsip daerah tidak dikelola secara profesional dan proporsional. Pada sisi lain, pengelolaan arsip daerah secara rutin dan terus-menerus adalah sebuah keniscayaan yang harus terpenuhi karena kearsipan bersifat dinamis dan menjadi bagian yang sangat strategis dalam sistem tata kelola penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Menurut Undang-undang Nomor 14 tahun 2008, pada setiap lembaga publik, harus tersedia Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang kemudian disingkat menjadi PPID. PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/ atau pelayanan informasi di badan publik. Dengan adanya undang-undang ini, tata kelola informasi dan dokumentasi yang diarsipkan menjadi sesuatu yang sifat wajib. Hal ini untuk menjamin terpenuhinya hak publik atas informasi.

Seiring dengan semakin intensifnya pelaksanaan pembangunan daerah, maka pengelolaan kearsipan termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan dalam hal kearsipan menjadi sebuah kebutuhan yang mendesak dan karenanya harus dilakukan upaya untuk mengimbangi desakan perkembangan informasi dan kebutuhan dalam sistem pengarsipan data dan informasi pembangunan daerah. Arsip ini kelak dapat digunakan sebagai alat evaluasi dalam perumusan kebijakan selanjutnya.

3.1.3. Urusan Pemerintahan Pilihan Urusan Kelautan dan Perikanan

Sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Konawe Selatan memiliki potensi untuk menciptakan nilai tambah, pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan yang inklusif dan berkelanjutan. Dari sisi kebijakan, khususnya kebijakan penataan ruang, Kabupaten Konawe Selatan memiliki wilayah yang ditetapkan sebagai kawasan pengembangan sektor perikanan daerah. Meskipun demikian, terdapat beberapa permasalahan urusan kelautan dan perikanan antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Dukungan infrastruktur utama dan pendukung pada sentra perikanan masih kurang.
- b. Belum optimalnya pengelolaan perikanan budidaya.
- c. Belum adanya industri pengolahan perikanan yang representatif.
- d. Produktivitas perikanan tangkap yang belum optimal.
- e. Usaha pengolahan hasil perikanan skala rumah tangga masih terbatas.
- f. Riset dan pengembangan teknologi dalam bidang perikanan di Kabupaten Konawe Selatan masih terbatas. Demikian pula diversifikasi industri yang memanfaatkan sumber daya dan kekayaan kelautan dan perikanan belum berkembang dalam menciptakan nilai tambah ekonomi.

Urusan Pariwisata

Kabupaten Konawe Selatan memiliki potensi untuk pengembangan sektor pariwisata, baik wisata alam atau ekowisata maupun budaya sehingga sektor pariwisata perlu mendapat perhatian agar dapat menjadi sumber pertumbuhan baru yang inklusif. Meski demikian terdapat permasalahan urusan pariwisata di Kabupaten Konawe Selatan sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya produk unggulan Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) daerah yang menjadi ciri khas Konawe Selatan (cinderamata, minumankhas, makanan khas).
- b. Masih rendahnya infrastruktur penunjang pada objek wisata dan menuju tempat wisata.

Urusan Pertanian

Sektor pertanian merupakan salah satu *sektor unggulan* yang juga menjadi lapangan usaha yang menyerap tenaga kerja tertinggi di Kabupaten Konawe Selatan. Meski demikian laju pertumbuhan sektor pertanian juga terus melambat dari tahun ke tahun. Tantangan utama sektor ini yakni penurunan share dalam pembentukan nilai PDRB serta menurunnya laju pertumbuhan yang memicu terjadinya pergeseran aktivitas bagi pelaku ekonomi disektor pertanian. Tantangan dan permasalahan lainnya umur petani yang menua (*aging population*), tidak adanya regenerasi serta pola pengelolaan usaha tani subsistendan belum adaptif terhadap teknologi sehingga berakumulasi terhadap penurunan produktivitas sektor pertanian Kabupaten Konawe Selatan.

Adapun permasalahan pertanian di kabupaten Konawe Selatan sebagai berikut:

- a. Masih terdapat alih fungsi lahan pertanian.
- b. Agribisnis pertanian yang di dukung pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pertanian melalui pola pertanian berkelanjutan dan ramah lingkungan masih kurang optimal;
- c. Kualitas SDM dan kelembagaan pertanian untuk meningkatkan kesejahteraan petani masih kurang;
- d. Produksi, produktivitas, dan mutu tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan dalam rangka berkontribusi pada pencapaian swasembada nasional belum mengalami peningkatan yang signifikan
- e. Sumber daya air pertanian makin kurang akibat rusaknya dan alih fungsi lahan kawasan penangkapan air dan daerah aliran sungai.
- f. Masih terbatasnya penangkaran benih tanaman pangan dan hortikultura, sehingga pada saat tanam petani kesulitan benih.
- g. Sering terjadinya kelangkaan pupuk di sentra-sentra pertanian.
- h. Masih terbatasnya fasilitas untuk Penyuluh Pertanian dalam melaksanakan tugasnya.
- i. Jaringan irigasi tersier sudah banyak yang rusak.
- j. Masih banyaknya Jalan Usaha Tani dan Jalan Produksi yang belum tertangani.

Urusan Perdagangan

Beberapa permasalahan yang berkaitan dengan urusan perdagangan, di Kabupaten Konawe Selatan antara lain:

- a. Sarana prasarana pasar di tiap kecamatan yang belum merata,
- b. ketersediaan data dan informasi komoditas yang diperdagangkan, jumlah dan daya saing produk yang diperdagangkan masih rendah
- c. Akses pasar komoditas unggulan masih rendah.
- d. Masih menjual bahan mentah.
- e. Peran tengkulak masih cukup tinggi.
- f. Pemanfaatan sarana dan prasarana pasar masih belum optimal.
- g. Pengelolaan pasar masih belum optimal.
- h. Pembangunan infrastruktur pasar yang belum merata.

Urusan Perindustrian

Aktivitas di sektor perindustrian di Kabupaten Konawe Selatan diperhadapkan pada permasalahan pada aspek produksi, tata kelola dan aspek pemasaran. Beragam industri skala rumah tangga, kecil, mikro dan menengah belum memiliki kemampuan daya saing dan penetrasi pasar yang terbatas. Berikut uraian permasalahan terkait perindustrian sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya pengembangan Potensi Ekonomi Lokal Daerah.
- b. Daya saing produk UMKM lokal belum baik dan kuat.
- c. Infrastruktur pada sentra-sentra belum baik.
- d. Penggunaan teknologi tepat guna belum optimal.
- e. Sumber energi untuk industri rumah tangga masih kurang.

Urusan Transmigrasi

Sebagai salah satu bentuk perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar manusia (*human rights*), yaitu perlindungan negara atas hak-hak warga (negara) untuk berpindah dan menetap di dalam batas-batas wilayah negaranya, serta hak untuk memiliki pekerjaan dan penghidupan yang layak. Melalui program transmigrasi diharapkan kemiskinan yang disebabkan oleh terbatasnya kesempatan kerja, ketidakseimbangan kapasitas dengan kebutuhan skill dan ketidakberdayaan penduduk untuk memperoleh tempat tinggal yang layak, dapat teratasi. Untuk itu pemerintah terus berupaya membuka kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk terlibat dan berperan serta dalam pelaksanaan transmigrasi.

Secara umum dan kasat mata, urusan transmigrasi tidak memberikan permasalahan yang berarti, namun jika lebih didalami secara detail, maka terdapat potensi konflik horizontal antara kelompok penduduk transmigrasi dengan masyarakat local yang membutuhkan pendekatan sosilogis yang tepat dan berdayaguna. Dalam konteks ini, fasilitasi dalam menemukan perasaan adil warga perlu dilakukan dengan melibatkan peran aktif tokoh kunci local dan organisasi local dalam merekatkan keberagaman yang ada di masyarakat. Permasalahan berikut terkait transmigrasi di Kabupaten Konawe Selatan sebagaiberikut:

- a. Belum optimalnya pemerintah daerah dalam penanganan sengketa lahan transmigrasi dan eks transmigrasi.
- b. Masih terdapat fasilitas infrastruktur daerah transmigrasi yang belum maksimal.

3.1.4. Urusan Penunjang Pemerintahan

Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa perencanaan pembangunan daerah lebih mengedepankan pendekatan perencanaan partisipatif politis, teknokratis, *top-down* dan *bottom-up* yang dilakukan secara terintegrasi merupakan bagian dan tahapan perencanaan pembangunan, baik dalam skala daerah maupun nasional. Secara teknis, sistem dan mekanisme perencanaan pembangunan antara lain dilaksanakan melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang, mulai dari tingkatan penyelenggara pemerintahan terbawah (desa/kelurahan) sampai pada level nasional. Pada dasarnya pelaksanaan forum Musrenbang tersebut, merupakan ajang untuk melakukan presentasi program dan kegiatan sehingga memberi ruang bagi masyarakat dalam melakukan penyesuaian terhadap program prioritas yang mereka rumuskan dan tidak mampu mereka lakukan secara swadaya.

Pola dan mekanisme dalam sistem perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Konawe Selatan belum berjalan sebagaimana mestinya terutama jika dilihat dari aspek konsistensi dan efektifitas dalam hal implementasinya. Belum konsisten dan efektifnya, mekanisme dan sistem perencanaan tersebut, disebabkan oleh berbagai hal, antara lain adalah: (1) Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah antar urusan, antar SKPD maupun antar sektor belum berjalan sebagaimana mestinya. (2) Masih terbatasnya data dan informasi yang akurat, baik administratif maupun spasial, (3). Kapasitas dan kuantitas sumberdaya aparatur perencana, sarana dan prasarana masih terbatas. (4) Belum efektifnya monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan di berbagai bidang/urusan dan (5) Aspek Perencanaan belum menjadi indikator dan instrumen utama untuk mendukung keberhasilan pembangunan maupun dalam tata kelola pemerintahan daerah.

Adapun permasalahan terkait perencanaan pembangunan sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya perencanaan pembangunan yang menjawab permasalahan sektoral pada pembangunan daerah.
- b. Belum optimalnya harmonisasi dan sinkronisasi perencanaan antar perangkat daerah.
- c. Belum optimalnya implementasi perencanaan berbasis partisipatif dalam menjawab isu dan tantangan pembangunan daerah.
- d. Belum optimalnya implementasi perencanaan pembangunan daerah yang berkesesuaian dengan hasil reses/aspirasi masyarakat.

Urusan Pengendalian dan Pengawasan

Pengembangan dan implementasi terhadap sistem pengawasan internal dan pengendalian kebijakan di bidang pembangunan daerah melalui kegiatan pengawasan internal secara berkala di Kabupaten Konawe Selatan belum berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini antara lain disebabkan oleh jumlah dan kapasitas aparat pengawasan internal pemerintah (APIP) Kabupaten Konawe Selatan masih sangat terbatas. Disisi lain, komitmen pengawasan internal dituntut untuk selalu tanggap dan profesional dalam melakukan tugas pokok dan fungsinya.

Peranan perangkat daerah yang terkait dengan pengawasan (APIP) dalam mendorong akuntabilitas kinerja instansi lingkup Pemerintah di Kabupaten Konawe Selatan sangat strategis, namun keterbatasan kewenangan yang tetap harus berkoordinasi dengan kepala daerah dalam hal ini bupati dan wakil bupati, sehingga fungsi penindakan/penyidikan kasus bergantung pada hasil koordinasi dimaksud. Adapun permasalahan urusan pengendalian dan pengawasan dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Masih tingginya temuan pemeriksaan oleh Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP).
- b. Masih terdapat temuan pemeriksaan oleh BPK.
- c. Masih kurangnya kesadaran perangkat daerah dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan.

- d. Masih kurangnya ketersediaan tenaga pemeriksa yang mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pengawasan.
- e. Masih kurangnya kuantitas APIP (Aparatur Pengawas Internal Pemerintah).
- f. Belum tersedianya SPIP (Sistem Pengawasan Internal Pemerintah) yang terintegrasi antar OPD (Organisasi Perangkat Daerah).

Urusan Keuangan

Dalam urusan yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah telah membuahkan hasil yang cukup memuaskan, ditandai dengan diperolehnya opini laporan pertanggungjawaban keuangan. Walaupun demikian, masih terdapat tantangan dan permasalahan antara lain:

- a. kuantitas dan kapasitas pengelola keuangan dan aset daerah
- b. ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai
- c. sistem tata kelola yang belum berbasis digital serta masih minimnya penatausahaan dan pemanfaatan asset daerah.
- d. Belum optimalnya upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- e. Terbatasnya kapasitas riil keuangan daerah kabupaten Konawe Selatan dalam membiayai kegiatan pembangunan daerah.

Urusan Kepegawaian

Sumber Daya Manusia memegang peran kunci dalam sistem kepegawaian dan dalam sejumlah proses yang dihasilkannya. Upaya memperbaiki sistem kepegawaian harus bermula dari mengurai masalah berkenaan dengan sistem rekrutmen dan seleksi. Pengelolaan Kepegawaian dan pengembangan sumberdaya manusia di Kabupaten Konawe Selatan belum optimal karena secara institusional, lembaga yang berwenang mengurus pengembangan sumberdaya manusia baru terbentuk, meskipun untuk urusan kepegawaian sudah sejak awal terbentuk. Hal yang paling mendesak mengutamakan pengalokasian kebutuhan tenaga pegawai atau sumber daya manusia (seperti guru, perawat, bidan, dokter dan dokter ahli) untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kepada masyarakat. Permasalahan urusan kepegawaian di Kabupaten Konawe Selatan diuraikan sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Konawe Selatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pemerintahan.
- b. Belum meratanya jumlah dan sebaran birokrasi yang profesional berbasis pada kompetensi dan kinerja.
- c. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah belum berjalan secara optimal.
- d. Masih kurangnya keterlibatan perempuan yang menduduki jabatan strategis dalam birokrasi.
- e. Fasilitas penunjang pendukung tupoksi aparatur masih terbatas.
- f. Pemberian reward dan punishment belum diterapkan secara optimal.

Urusan Sekretariat Daerah

Sebagai konsekuensi dari daerah definitive, maka pelaksanaan urusan otonomi daerah dan pemerintahan umum harus dilaksanakan sesegera mungkin untuk optimalisasi layanan kepada masyarakat dan menjamin berjalannya system pemerintahan daerah. Demikian pula yang terjadi di Kabupaten Konawe Selatan yang sejauh ini telah menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan, antara lain ditandai dengan penyusunan perangkat organisasi daerah (SKPD), fasilitasi, koordinasi, dan penyusunan rancangan peraturan daerah (Raperda) serta penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah secara keseluruhan. Pelaksanaan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah masih dihadapkan oleh berbagai kendala dan permasalahan antara lain:

- a. Belum maksimalnya keterbukaan informasi publik
- b. Belum maksimalnya informasi penyelenggaraan pemerintah daerah berbasis data secara online
- c. Belum optimalnya pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP), baik pelayanan kepada masyarakat maupun dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- d. Belum dilaksanakannya Evaluasi/Survey Kepuasan Masyarakat terhadap unit kerja pelayanan publik yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintah daerah Kabupaten Konawe Selatan.
- e. Belum optimalnya upaya penguatan satuan kerja yang mendukung dan menunjang keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkup pemerintah daerah Kabupaten Konawe Selatan.

Urusan Penanggulangan Bencana

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Perangkat Organisasi Daerah, urusan kebencanaan merupakan bagian dari kewenangan Pemerintah daerah. Urusan penanggulangan bencana di Kabupaten Konawe Selatan telah dilaksanakan melalui pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe Selatan. Sejauh ini, masalah utama di dalam urusan penanggulangan bencana daerah adalah:

- a. fasilitas dan sarana pendukung serta kapasitas sumberdaya manusia masih terbatas,
- b. ketersediaan data dan informasi mengenai peta potensi dan daerah rawan bencana di wilayah ini belum tersedia.

3.2. Isu Strategis

Analisis isu-isu strategis Konawe Selatan, selain disusun dengan pertimbangan geo-ekonomi dan politik secara global, regional dan nasional, analisis juga disusun dengan memperhatikan isu strategis pada berbagai segmen perencanaan baik sektoral maupun spasial, berbagai informasi ini dihimpun dengan menggabungkan beberapa pendekatan antara lain: (i). penelusuran dokumen baik dalam jaringan maupun luar jaringan: (ii). diskusi kelompok terpumpun; serta (iii). survei purposif, setelah dihimpun, semua informasi dianalisis agar secara tekstual dapat padu-padan dengan substansi dokumen perencanaan pada tingkat nasional maupun dokumen perencanaan pada tingkat provinsi.

Pada aras global, dunia saat ini tengah berhadapan dengan tantangan atas: (i). ketersediaan pangan (food); (ii). krisis energi (electricity); (iii).krisis iklim (climate); (iv). kelesuan ekonomi (slowdown growth); serta (v). bencana alam, sosial dan kesehatan. Keadaan ini telah mendorong seluruh pemerintah didunia untuk melakukan afirmasi keadaan ini kedalam perencanaan mereka baik keperluan persiapan (contingency) maupun untuk meminimalisir efek atas keadaan tersebut (mitigasi). Pada saat yang sama di tingkat regional Asia-Pasifik dan ASEAN beberapa isu mengemuka: (i). pekerja migran; (ii). rantai pasok logistik; (iii). pertanian dan perkebunan berkelanjutan; (iv). bencana alam; serta (v). kejahatan lintas batas negara.

Pada tingkat nasional terdapat beberapa isu penting yang menjadi perhatian bersama antara seluruh daerah saat ini yakni: (i). stunting; (ii). kemiskinan ekstrim; (iii) inflasi; (iv). pengurangan risiko bencana; (v). bonus demografi; (vi). penurunan kualitas lingkungan; (vii). perubahan iklim; (viii). pelayanan publik; serta (ix). pengaturan ruang darat, laut dan udara. Terdapat beberapa isu yang beririsan pada aras global, nasional dan lokal seperti problem pangan, energi dan lingkungan, serta makin masifnya platform digital dalam percakapan publik dan bisnis yang kesemuanya membuat aktivitas sosial dan ekonomi menjadi semakin ringkas dan berbeda, hal ini ditandai dengan semakin ringkasnya saluran distribusi, berkembangnya metode pembayaran yang menyesuaikan dengan corak aktivitas ekonomi, serta tergantikannya metoderetail gaya konvensional berbasis *merchant*.

Berkut uraian isu strategis dalam konteks global, nasional dan regional yang penting mendapatkan perhatian bersama atas seluruh stakeholders pembangunan Kabupaten Konawe Selatan:

a. Bonus Demografi

Disela kemajuan zaman dengan segala plus minusnya bagi generasi muda, saat ini, Indonesia dianugerahi “Bonus Demografi” yang harus mendapat perhatian serius. Indonesia diprediksi akan mendapatkan bonus tersebut ditahun 2020-2030 dimana penduduk dengan umur produktif sangat besar sementara usia muda semakin kecil dan usia lanjut belum banyak. Melimpahnya jumlah penduduk usia produktif tersebut akan berimplikasi pada dinamika kegiatan ekonomi terutama pada sektor-sektor yang menyerap lapangan kerja tertinggi sehingga dalam jangka panjang akan memacu pertumbuhan ekonomi. Bonus tersebut tentu mensyaratkan kualitas sumberdaya manusia.

Bonus demografi bagi daerah membutuhkan arah kebijakan yang tepat agar manfaatnya dapat dinikmati bagi daerah. Berbagai kebijakan yang tepat diperlukan untuk menyiapkan kualitas sumber daya manusia yang akan masuk ke angkatan kerja; menjaga penurunan fertilitas; menyiapkan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja; dan kebijakan ekonomi dalam menciptakan lapangan kerja, fleksibilitas pasar tenaga kerja, keterbukaan perdagangan dan tabungan serta dukungan sarana dan prasarana.

Terkait dengan hal tersebut, Kabupaten Konawe Selatan juga mempunyai potensi untuk memanfaatkan bonus demografi. Penduduk usia produktif saat ini mendominasi total populasi penduduk di Kabupaten Konawe Selatan. Tingginya jumlah dan proporsi penduduk usia kerja tersebut selain meningkatkan angkatan kerja dalam daerah juga membuka peluang untuk mengisi kebutuhan tenaga bagi daerah lain bahkan negara lain yang proporsi penduduk usia kerjanya menurun. Kondisi ini menjadi peluang bagi pemerintah daerah Kabupaten Konawe Selatan untuk menyiapkan kebijakan yang tepat bagi generasi mudanya untuk lebih mandiri, kreatif dan berjiwa wirausaha sehingga pada saatnya nanti generasi bonus demografi Kabupaten Konawe Selatan tersebut dapat memberikan manfaat bagi pembangunan Kabupaten Konawe Selatan.

Akan tetapi, apabila tidak didukung dengan kebijakan yang tepat, bonus demografi tidak akan dapat diraih, bahkan dapat menimbulkan berbagai dampak yang tidak diinginkan. Penduduk yang besar akan meningkatkan tekanan pada kebutuhan pangan dan energi serta kelestarian dan kualitas lingkungan. Jika tidak ada perencanaan yang komprehensif dan terintegrasi terkait tahun “Bonus Demografi” tersebut maka pada tahun 2020-2030 Kabupaten Konawe Selatan akan diperhadapkan pada kelompok penduduk usia produktif yang tidak berkualitas dan bahkan berpotensi tidak terserap di lapangan kerja yang berkonsekuensi menjadi beban daerah. Daerah yang memiliki kelompok penduduk dengan usia produktif yang tidak bekerja/menganggur berpotensi menciptakan kerawanan ekonomi, sosial dan masalah keamanan.

b. Sustainable Development Goals (SDGs)

Analisis isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Isu strategis merupakan hasil analisis dari FGD (*Focus Group Discussion*) dengan seluruh OPD dan bagian-bagian yang ada dalam Sekretariat Daerah. Disamping itu, isu strategis tersebut merujuk pada (*Sustainable Development Goals/SDGs* (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan)).

Terkait dengan pelaksanaan SDGs, Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya dengan menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Perpres SDGs). Oleh karena itu, dalam rangka pencapaian target SDGs kedepannya, Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan melakukan adaptasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan untuk memasukkan agenda SDGs sebagai arah kebijakan pembangunan daerah kedepan.

c. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan isu yang memerlukan penanganan multi sektor. Tingkat kemiskinan di Kabupaten Konawe Selatan masih menjadi isu strategis dalam penyelenggaraan urusan pembangunan. Tingkat kemiskinan di Kabupaten Konawe Selatan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir menunjukkan *tren* penurunan yang cukup signifikan, dari data yang diperoleh antara tahun 2021 sampai tahun 2023 terus mengalami penurunan yaitu pada tahun 2021 di angka 4,84% di tahun 2022 di angka 5,85% di tahun 2023 diangka 5,19%.

Salah satu problem dalam penanganan kemiskinan adalah kemampuan pemerintah daerah mempertahankan penurunan persentase kemiskinan secara konsisten yang diakibatkan ragam kriteria dan penyebab kemiskinan. Rendahnya persentase kemiskinan juga menjadi tantangan pemerintah daerah untuk melakukan pemetaan secara detail penduduk yang mengalami kondisi miskin tersebut. Beragam indikator tentu juga membutuhkan intervensi yang berbeda pula dalam penanganan penduduk miskin.

Oleh karena itu, data penduduk miskin memerlukan *updating* secara rutin dengan melibatkan pemerintah hingga di level desa serta penduduk setempat untuk memastikan validitas data, baik ditinjau dari jenisnya ataupun ditinjau dari penyebabnya. Selain itu, perlunya arah kebijakan pembangunan daerah tidak bias terhadap penyelesaian akar masalah kemiskinan, adanya kebijakan yang mampu menciptakan distribusi hasil pembangunan yang merata di semua kelompok masyarakat, menciptakan pemerataan kesempatan bekerja maupun pemerataan kesempatan berusaha. Karenanya kebijakan pembangunan yang partisipatif dan akomodatif serta memberikan keberpihakan terhadap penduduk miskin pada akhirnya akan mendorong perbaikan kondisi kesejahteraan masyarakat daerah yang bersangkutan.

Meskipun kondisi jumlah penduduk miskin di Kabupaten Konawe Selatan yang cenderung mengalami penurunan, hal ini mengharuskan adanya upaya dan

aksi nyata dari Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan dalam melakukan penanggulangan kemiskinan dengan kerja keras serta keseriusan dari seluruh pemangku kepentingan baik Pemerintah Pusat, Daerah maupun seluruh komponen (Masyarakat, Dunia Usaha, Perguruan Tinggi, LSM dan lain- lain). Belum optimalnya penurunan angka kemiskinan di Indonesia termasuk di Kabupaten Konawe Selatan, salah satu faktornya dikarenakan belum optimalnya komitmen, konsistensi dan keterpaduan (harmonisasi) dalam menangani masalah kemiskinan. Ego sektoral pada bidang dan urusan tertentu masih mewarnai dalam penetapan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan.

d. Ketahanan Pangan

Kebutuhan pangan senantiasa meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk. Disisi pemenuhannya, tidak semua kebutuhan pangan dapat dipenuhi, karena kapasitas produksi dan distribusi pangan semakin terbatas. Hal ini dapat berimplikasi pada ketidakstabilan pangan antara kebutuhan dan pemenuhannya. Permasalahan secara umum mengenai ketahanan pangan adalah jumlah penduduk yang semakin besar dengan pertumbuhan penduduk yang positif. Dengan demikian permintaan akan pangan semakin meningkat. Peningkatan permintaan pangan juga didorong oleh peningkatan pendapatan, kesadaran akan kesehatan dan pergeseran pola makan karena pengaruh globalisasi, serta ragam aktivitas masyarakat. Di sisi lain, ketersediaan sumber daya lahan semakin berkurang, karena tekanan penduduk, serta persaingan pemanfaatan lahan antara sektor pangan dengan sektor non pangan.

Potensi pangan di Kabupaten Konawe Selatan meliputi; luas lahan persawahan mencapai 20.148 Ha dengan luas panen sebesar 20.198 Ha dan produktivitas sebesar 37,69 kuintal/Ha. Potensi ternak besar seperti sapi sebesar 69,274 ekor, ternak kerbau sebesar 334 ekor. Untuk ternak kecil seperti kambing sebesar 18,098 ekor dan babi sebesar 9,440 ekor. Sedangkan unggas seperti ayam sebesar 1.422.987 ekor. Potensi perikanan meliputi perikanan laut produksi sebesar 9.913,259 ton dan produksi ikan darat sebesar 201,868 ton (BPS Konawe Selatan, 2024).

Capaian Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Konawe Selatan mencapai 82,71 ditahun 2022. Adapun Indeks Keterjangkauan Pangan sebesar 86,36 dan Indeks Pemanfaatan Pangan sebesar 70,91 pada tahun 2020 dan Indeks Ketersedian Pangan sebesar 91,81% (Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, 2020). Secara umum permasalahan ketahanan pangan dan pertanian di kabupaten Konawe Selatan antara lain disebabkan oleh *pertama*, jumlah penduduk yang terus bertambah dari tahun ke tahun menyebabkan tingginya tingkat kebutuhan atau permintaan akan pangan saat ini jumlah penduduk Konawe Selatan sebesar 322.946 jiwa. *Kedua*, sumber daya air pertanian makin kurang akibat rusaknya daerah sumber air. *Ketiga*, ketersediaan sumber daya lahan semakin berkurang akibat tekanan penduduk serta persaingan pemanfaatan lahan antara sektor pangan dengan sektor non pangan. Penggunaan lahan yang paling luas di Konawe Selatan yaitu sebagai pekarangan/tanah untuk bangunan dan halaman sekitarnya sebesar 34,59% dari total luas lahan di Konawe Selatan. *Keempat*, alih fungsi lahan kawasan penangkapan air dan daerah aliran sungai serta lahan perkebunan serta *kelima* sistem pengelolaan cadangan pangan belum berjalan dengan baik.

e. Kehidupan Sehat dan Sejahtera

Pembangunan di bidang kesehatan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang ditujukan untuk meningkatkan derajat kesehatan dalam mencapai tujuan. Oleh karena itu, pemerintah baik pusat maupun daerah secara bersungguh-sungguh dan terus menerus berupaya untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan baik yang bersifat promosi, preventif, kuratif dan rehabilitatif di seluruh jenjang fasilitas pelayanan kesehatan.

Pembangunan kesehatan di Kabupaten Konawe Selatan sebagai bagian terpadu dari pembangunan daerah dimana, Kabupaten Konawe Selatan bertujuan mewujudkan masyarakat maju, damai dan sejahtera. Perwujudan derajat kesehatan yang optimal dalam tujuan pembangunan kesehatan diarahkan pada peningkatan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang khususnya masyarakat Kabupaten Konawe Selatan, maka telah dilaksanakan upaya kesehatan dengan paradigma baru yaitu paradigma sehat melalui visi pembangunan kesehatan yaitu Gerakan Masyarakat Sehat (GERMAS) 2016 terutama penyakit menular yang ada kaitannya dengan lingkungan (penyakit berbasis lingkungan), yang mana ditandai dengan lingkungan dengan perilaku sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu secara adil dan merata, serta memiliki derajat kesehatan yang optimal.

Permasalahan di bidang kesehatan yang menjadi isu dan masalah pembangunan di Kabupaten Konawe Selatan adalah masih terdapatnya Angka Kematian Ibu (AKI) melahirkan pada tahun 2023 Per 1000 KH berada di angka 235 dan untuk Prevalensi Stunting Balita pada tahun 2023 sebesar 19,3%, selain itu untuk Treatment Coverage TB pada tahun 2023 sebesar 47,88% dan cakupan JKN pada tahun 2023 sebesar 85,1%

Disamping itu isu lainnya adalah masih rendahnya mutu pelayanan kesehatan, ketersediaan fasilitas baik sarana maupun prasarana kesehatan yang belum memadai, serta sumber daya manusia kesehatan (SDMK) yang masih relatif terbatas dan tidak merata di semua wilayah Kabupaten Konawe Selatan. Upaya untuk meningkatkan mutu layanan kesehatan dilakukan melalui peningkatan atau pembangunan sarana dan prasarana serta peningkatan

kualitas dan mutu sumber daya manusia kesehatan. Hal yang tidak kalah pentingnya juga adalah perlunya pemerintah daerah memastikan jaminan kesehatan kepada seluruh masyarakat miskin maupun perlindungan sosial lainnya guna mewujudkan *Universal Health Coverage (UHC)*.

f. Pendidikan Berkualitas

Pendidikan sebagai modal dan investasi yang bersifat jangka panjang yang tentu memberikan dampak positif bagi pembangunan suatu daerah di masa mendatang. Salah satu upaya pemerintah menciptakan pendidikan yang berkualitas melalui adanya Program wajib belajar 9 (sembilan) tahun yang merupakan tanggungjawab bersama pemerintah pusat maupun daerah. Rata-rata lama sekolah maupun harapan lama sekolah merupakan indikator yang dapat menggambarkan kualitas Pendidikan di suatu daerah. Tahun 2023 rata-rata lama sekolah Kabupaten Konawe Selatan yakni 7,86 tahun yang artinya jumlah penduduk Konawe Selatan yang berumur 25 tahun ke atas rata-rata menjalani pendidikan formal selama 7,86 tahun. Permasalahan mutu pendidikan di Kabupaten Konawe Selatan tidak terlepas dari kondisi kualitas sarana dan prasarana pendidikan maupun akses/keterjangkauan yang berbeda-beda antar kecamatan. Terdapat beberapa kecamatan yang berstatus terpencil dan sangat terpencil yang berimplikasi pada ketersediaan (kuantitas dan kualitas) sarana dan prasarana yang tidak memadai serta dukungan tenaga pendidik dan tenaga pendidikan yang belum merata pula.

Disamping itu, problem lainnya adalah belum optimalnya peningkatan kompetensi kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang terlihat dari masih terdapat guru yang belum memiliki kualifikasi pendidikan S1 atau D4. Data Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe Selatan (2020) diketahui bahwa Aparatur Sipil Negara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Konawe Selatan yang telah memenuhi kualifikasi pendidikan yang di kelompokkan kedalam spsesifikasi sekolah untuk jumlah guru taman kanak-kanak (TK) ditahun 2022/2023 berjumlah 676, untuk tingkat Sekolah Dasar (SD) berjumlah 2.803, untuk Madrasah Iptidadiyah (MI) jumlah guru sebanyak 271, untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP9 sebesar 1.212, untuk Madrasah Tsanawaiyah sebanyak 431, untuk Sekolah Menengah Atas (SMA) sebanyak 719, untuk Sekolah Menengah kejuruan (SMK) sebanyak 208, untuk Sekolah Madrasah Aliyah (MA) sebanyak 260 (data BPS Kab. Konawe Selatan Tahun 2024).

Oleh karena itu, peningkatan mutu dan akses pendidikan perlu dilakukan dengan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan, peningkatan mutu kualitas tenaga pendidik dan kependidikan serta meningkatkan manajemen pendidikan yang merata di semua wilayah kecamatan, terutama pada daerah-daerah terpencil yang ada di Konawe Selatan.

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Data menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2023 yaitu 70,64. Nilai IPM yang bernilai sedang ini masih berada dibawah angka IPM provinsi Sulawesi Tenggara yaitu sebesar 71,20.

Capaian IPM di Kabupaten Konawe Selatan dipengaruhi oleh beberapa komponen yaitu dari aspek kesehatan yakni angka harapan hidup yang masih rendah; aspek pendidikan yakni Rata-rata Lama Sekolah; dan aspek ekonomi (pengeluaran per kapita dan paritas daya beli). Capaian kualitas IPM tersebut juga belum diimbangi perbaikan kualitas pembangunan SDM yang lainnya yakni capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender.

g. Kesetaraan Gender

Ideologi patriarki yang dianut oleh sebagian besar masyarakat dunia sejak dulu telah membatasi gerak kaum perempuan khususnya di ruang publik. Ideologi ini merupakan akar masalah yang menimbulkan diskriminasi terhadap perempuan, dan kemudian muncul ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender. Hal ini termanifestasikan dalam bentuk *stereotip*, marginalisasi, subordinasi, tindak kekerasan dan beban kerja terhadap perempuan. Secara nasional isu pembangunan gender di Indonesia bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan, peningkatan peran perempuan di berbagai bidang kehidupan, pengintegrasian perspektif gender di semua tahapan pembangunan dan penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender baik di level pusat maupun daerah.

Capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) serta Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Konawe Selatan dibandingkan dengan capaian IPM (Indeks Pembangunan Manusia) juga cenderung belum membaik. Faktor utama yang menyebabkan masih rendahnya IPG dan IDG Kabupaten Konawe Selatan adalah masih rendahnya kontribusi pendapatan perempuan dalam keluargaserta masih kurangnya peran aktif perempuan dalam lingkup birokrasi,kehidupan ekonomi maupun politik. Belum optimalnya pembangunan gender di Kabupaten Konawe Selatan ditunjukkan dengan masih rendahnya Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IPG). Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kabupaten Konawe Selatan pada tahun 2022 yaitu 73,97 dan masih berada dibawah angka provinsi yaitu 90,30 dan berada pada urutan ke 7 dari 17 kabupaten/kota se-Provinsi Sulawesi Tenggara.Rendahnya angka IPG Kabupaten Konawe Selatan dipengaruhi oleh faktorrendahnya Angka Harapan Hidup berjenis kelamin laki-laki jika dibandingkan dengan Angka Harapan Hidup berjenis kelamin perempuan. Sedangkan nilai IDG Kabupaten Konawe Selatan pada tahun 2023 yaitu 75,29% dan beradadiatas angka capaian Provinsi Sulawesi Tenggara.

h. Air Bersih dan Sanitasi Layak

Di Bidang infrastruktur pengairan, pembangunan diarahkan kepada upaya pemenuhan ketersediaan air baku masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari, pemenuhan ketersediaan air irigasi untuk pertanian serta upaya penanggulangan bahaya banjir dan abrasi kawasan pantai. Beberapa program dan kegiatan yang telah dilaksanakan untuk tujuan tersebut di atas, diantaranya melalui pembangunan sarana pengelolaan air minum, sanitasi, peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi, rehabilitasi/normalisasi sungai. Pembangunan tersebut dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat bidang air minum, sanitasi dan air limbah, juga diarahkan untuk mendukung program pemerintah yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dengan target sasaran pada tahun 2024 yaitu 90% rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi layak termasuk 15% akses aman; dan 100% rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak termasuk 15% akses aman. Dari data yang diperoleh pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Konawe Selatan (2023) diketahui bahwa untuk persentase penduduk berakses air minum menunjukkan

peningkatan, dimana sebanyak 92,5 % pada tahun 2023 meningkat dari tahun 2022 yang capaiannya masih 92%. Hal ini semua terjadi karena adanya peningkatan pembangunan infrastruktur secara kolaboratif baik yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota bidang sanitasi dan air minum pada kurun waktu tersebut.

i. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Konawe Selatan menunjukkan tren penurunan selama kurun waktu 3 tahun terakhir (2021-2023). Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Konawe Selatan pada tahun 2021 sebesar 4,84 %, trend terjadi peningkatan terlihat pada tahun 2022 yaitu sebesar 5,85 %, tahun 2023 terjadi penurunan yaitusebesar 5,19 %, (BPS Konawe Selatan, 2024). Penurunan pertumbuhan ekonomi akan berpengaruh terhadap kemampuan daya saing daerah. Dari 17 sektor ekonomi/lapangan usaha, kontribusi terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Konawe Selatan antara lain sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yaitu sebesar 25,78 %, serta sektor pertambangan dan penggalian yaitu sebesar 20,85 %. Sedangkan sektor yang memiliki kontribusi terendah terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Konawe Selatan adalah sektor Jasa perusahaan yaitu hanya sebesar 0,01 %.

Jika dilihat dari sisi pengeluaran agregat, pengeluaran konsumsi rumah tangga memiliki kontribusi terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi Konawe Selatan pada tahun 2023 yang mencapai 55,14 %. *Share* pengeluaran investasi sebagai salah satu komponen yang memiliki dampak ganda terhadap perekonomian daerah justru masih rendah. Salah satu faktor utama pemicu masih investasi di Kabupaten Konawe Selatan disebabkan oleh aspek regulasi diantaranya belum tersedia rencana detail tata ruang untuk keseluruhan wilayah Kabupaten Konawe Selatan yang mengakibatkan tumpang tindih lokasi. Hal lain, pada aspek pemantauan lingkungan hidup terhadap kegiatan investasi yang ada saat ini belum dilakukan secara optimal. Demikian pula belum optimalnya pelayanan perizinan dan non perizinan investasi sehingga turut menghambat rendahnya daya tarik investasi. Salah satu upaya yang dilakukan adalah mengurangi hambatan regulasi disertai dengan upaya promosi investasi yang kontinu sehingga mendorong tumbuhnya kegiatan investasi di Kabupaten Konawe Selatan pada masa yang akan datang.

i. Industri, Inovasi dan Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur sangat berperan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Daerah dengan ketersediaan infrastruktur yang memadai akan menciptakan dinamika aktivitas perekonomian sehingga berimplikasi terhadap pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Program pembangunan infrastruktur di beberapa daerah pada umumnya ditargetkan dalam jangka menengah dan jangka Panjang dengan fokus pada peningkatan kualitas infrastruktur dasar dan wilayah diantaranya energi, air bersih, jaringan informasi dan telekomunikasi (IT), transportasi, irigasi, jembatan, pasar, rumah sakit, puskesmas, sekolah maupun fasilitas publik lainnya.

Salah satu permasalahan utama yang ada di Kabupaten Konawe Selatan adalah belum optimalnya kondisi mantap jalan, jembatan, drainase, maupun infrastruktur kesehatan dan ekonomi lainnya. Selain itu, keberadaan industri yang berbasis IKM diperhadapkan dengan daya saing yang rendah. Aspek inovasi yang dapat mendorong tumbuhnya kegiatan ekonomi kreatif juga belum optimal.

Infrastruktur jalan di Kabupaten Konawe Selatan pada tahun 2023 mencapai 867,17 Km dalam kondisi mantap jalan dengan jalan yang sudah diaspal baru mencapai 290,79 Km, jalan beton sepanjang 13,09 Km, jalan kerikil sepanjang 563,29 Km, serta jalan dalam kondisi baik sepanjang 295,76 Km (Data PUPR Kab. Konawe Selatan). Karenanya pembangunan infrastruktur sektor pekerjaan umum memerlukan perencanaan yang responsif dan terarah karenanya implikasinya cukup luas terhadap perekonomian Kabupaten Konawe Selatan.

j. Berkurangnya Kesenjangan

Penurunan pertumbuhan ekonomi juga akan berimplikasi terhadap rendahnya daya saing serta melemahnya berbagai kinerja makro ekonomi daerah lainnya. Demikian pula akan menurunkan kegiatan di sektor konsumsi dan daya beli masyarakat Konawe Selatan. Dari 17 lapangan usaha/ sektor ekonomi, persentase terbesar yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Konawe Selatan adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yaitu sebesar 26.68 %, serta sektor pertambangan dan penggalian yaitu sebesar 22,33 %. Adapun sektor terendah yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Konawe Selatan adalah sektor jasa

perusahaan yaitu hanya sebesar 0,01 %. Dari sisi pengeluaran, sektor pengeluaran konsumsi rumah tangga berkontribusi paling tinggi hingga tahun 2020. Hal ini mengindikasikan bahwa kegiatan konsumsi rumah tangga memiliki peran penting dalam mendinamisir perekonomian Kabupaten Konawe Selatan

k. Penanganan Perubahan Iklim dan Lingkungan

Isu lingkungan menempati posisi strategis dalam konteks pembangunan berkelanjutan yang berprinsip untuk memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan. Faktor penting untuk mencapai berkelanjutan adalah pembangunan dengan tetap memperhitungkan faktor lingkungan. Penanganan yang tepat terhadap permasalahan lingkungan yang muncul sebagai dampak dari pembangunan menjadi tugas pemerintah dan juga masyarakat dan swasta melalui sinergi bersama guna peningkatan kualitas lingkungan, pencegahan pencemaran dan peningkatan daya dukung lingkungan.

Penurunan dan kerusakan kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Konawe Selatan ditandai dengan banyaknya degradasi hutan serta menurunnya kualitas sumber daya air, masih banyaknya lahan yang berpotensi kritis dan meningkatnya volume sampah akibat semakin meningkatnya jumlah penduduk Kabupaten Konawe Selatan.

Alih fungsi lahan merupakan salah satu permasalahan di Kabupaten Konawe Selatan yang perlu mendapat perhatian dan penanganannya memerlukan perencanaan yang matang. Alih fungsi lahan pertanian yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Saat ini luas lahan pertanian produktif di Kabupaten Konawe Selatan yaitu lahan persawahan sebesar 5.61 %, lahan perkebunan sebesar 6.29 %, lahan tanaman kayu/hutan rakyat sebesar 4.82 %, lahan perkebunan sebesar 20.01 %, lahan tambak/kolam ikan sebesar 19.84 %, lahan ladang sebesar 4.41%, padang rumput sebesar 1.73 %, lahan tidur sebesar 2.69 % dan lahan pekarangan untuk bangunan sebesar 34.59 %. Selain itu pula, masih terjadi pemanfaatan ruang secara ilegal yang mengganggu kenyamanan dan kualitas lingkungan hidup, hal tersebut ditunjukkan dengan tingkat kesesuaian penggunaan pola ruang yang tidak sesuai dengan tata ruang Kabupaten Konawe Selatan.

I. Kualitas Tata Kelola Pemerintahan

Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan sekarang ini sedang diperhadapkan pada satu agenda besar, khususnya untuk waktu lima tahun yang akan datang. Agenda besar tersebut terkait dengan, *Pertama*, posisi daya saing dan kemajuan yang telah dicapai selama ini. Beberapa hal yang kemudian harus terus diperkuat adalah penguatan regulasi dan kebijakan yang selama ini sudah menunjukkan keberpihakan pada publik. *Kedua*, adalah terkait dengan upaya efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan pemerintahan. Kondisi saat ini Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan telah melakukan perubahan-perubahan yang sangat mendasar terkait dengan birokrasi dan tata kelola pelayanan publik.

Namun demikian, belum optimalnya pelayanan publik serta tata kelola pemerintahan yang baik di Kabupaten Konawe Selatan masih merupakan masalah pembangunan. Upaya untuk melakukan peningkatan pelayanan publik dilakukan dengan usaha-usaha perbaikan *service delivery*, maupun *manufacturing* secara internal OPD. Sedangkan peningkatan tata kelola pemerintahan dilakukan dengan efektifitas pembinaan dan pengawasan terhadap seluruh unsur manajemen pemerintahan.

BAB IV

VISI, MISI, DAN PROGRAM

4.1. Visi

Visi adalah merupakan gambaran kesuksesan yang ingin dicapai dalam lima tahun kedepan. Visi Adi Jaya Putra dan James Adam Mokke sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Periode 2025-2030 yaitu :

KABUPATEN KONAWE SELATAN YANG SEJAHTERA, INOVATIF, DAN BERKELANJUTAN

Adapun definisi operasional dari pernyataan visi tersebut adalah sebagai berikut :

- **SEJAHTERA** ; Konawe Selatan “sejahtera” dapat diartikan bahwa keadaan masyarakat yang dapat memenuhi kebutuhan dasar dan sekunder yang mengembangkan diri secara finansial dan sosial untuk meningkatkan taraf hidup yang adil dan merata. Masyarakat Konawe Selatan yang terpenuhi dan terfasilitasi hak-hak dasarnya, termasuk perlindungan sosial dan pemenuhan kebutuhan dasar akibat bencana, perlindungan kelompok rentan, hak atas pendidikan, kesehatan, sandang, pangan, lingkungan, perumahan, berkurangnya angka kemiskinan absolut dan pengangguran serta semakin meningkatnya pendapatan rata-rata masyarakat.
- **INOVATIF** ; dapat diartikan bahwa Konawe Selatan dengan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan berpikir kreatif, adaptif, berkualitas, berkarakter dan mampu memanfaatkan teknologi secara efektif dapat mengembangkan solusi-solusi baru yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, kelembagaan pemerintahan yang andal, akuntabel serta perekonomian yang maju dan tangguh.
- **BERKELANJUTAN (*Sustainable*)** ; Dalam konteks Kabupaten Konawe Selatan “berkelanjutan” dapat diartikan penataan ruang atau pembangunan yang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, ketangguhan infrastruktur serta kehidupan sosial masyarakat berlandaskan ekonomi lestari. Berkelanjutan juga diartikan yaitu tetap menghormati dan melanjutkan upaya pemerintah sebelumnya terhadap program-program pembangunan yang telah berhasil dan memberikan dampak positif terhadap masyarakat.

4.2. Misi

Misi menjelaskan penggambaran visi yang hendak dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan atau dipandang sebagai pilihan jalan bagi pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, aktivitas pembangunan dan layanan publik bagi pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan secara keseluruhan.

Berdasarkan pemahaman tersebut, maka misi pasangan Adi Jaya Putra-James Adam Mokke sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Periode 2025-2030 adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan perekonomian yang berkeadilan dan berkualitas

Perekonomian yang berkeadilan dan berkualitas ditunjukkan dengan pertumbuhan sektor ekonomi yang stabil, produktivitas kuat, berdaya saing, dan nilai tambah tinggi. Hal tersebut didorong dengan inovasi berteknologi tinggi yang mendorong efisiensi untuk menghasilkan produk komoditas yang berkualitas, akselerasi ekosistem UMKM, serta pengembangan kapasitas SDM yang sesuai dengan kebutuhan pasar dan adaptif terhadap transformasi digital. Misi ini diarahkan untuk menjawab isu pembangunan yang cenderung hanya berjalan pada kurun waktu tertentu saja serta parsial. Misi ini meliputi berbagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi Konawe Selatan, pendapatan masyarakatnya, serta infrastruktur, sarana dan prasarana yang menunjang keberlanjutan pembangunan. Pembangunan berkualitas memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat memiliki akses dan partisipasi dalam proses ekonomi. Ini mencakup penyediaan peluang pekerjaan, pelatihan keterampilan, dan dukungan bagi kelompok yang rentan atau terpinggirkan. Transformasi ekonomi harus memperhitungkan distribusi pendapatan yang lebih merata, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh semua orang di Konawe Selatan

2. Mewujudkan sumber daya manusia yang unggul dan inovatif

Kemajuan pembangunan yang merata salah satunya didukung oleh sumber daya manusia yang unggul dan inovatif. Dalam menghadapi Indonesia Emas 2045, transformasi sumber daya manusia menjadi modal penting yang kualitasnya perlu ditingkatkan melalui bidang-bidang pendidikan, kesehatan,

dan pemberdayaan gender dan sosial. Rumusan misi ini didasarkan pada kesesuaian dengan kondisi sumber daya manusia Konawe Selatan yang masih membutuhkan perhatian. Tren capaian Indeks pembangunan manusia (IPM) masyarakat masih rendah jika dibandingkan dengan IPM Provinsi Sulawesi Tenggara. Oleh karena itu, pembangunan manusia yang unggul dan berdaya saing mengacu pada upaya mewujudkan kondisi masyarakat agar memiliki kesehatan fisik dan mental yang baik, berkembangnya potensi individu secara optimal, dan tumbuhnya daya saing yang tinggi dalam berkompetisi. Unggul merujuk pada pembangunan manusia yang menekankan pentingnya pendidikan berkualitas dan merata yang mencakup akses dan layanan pendidikan untuk semua, ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan, peningkatan mutu tenaga pendidik dan kependidikan, serta kurikulum yang relevan dengan tuntutan zaman. Unggul bermakna pula terkondisikannya pengembangan potensi individu melalui pemberdayaan masyarakat untuk mengembangkan keterampilan dan bakat mereka agar dapat berkontribusi secara optimal dalam masyarakat maupun secara ekonomi. Unggul akan bermuara pada munculnya sumber daya manusia yang berdaya saing, mampu mengadopsi dan mengembangkan inovasi serta teknologi. Misi ini mencakup investasi dalam riset dan pengembangan, serta memastikan bahwa masyarakat memiliki akses ke teknologi informasi dan komunikasi yang mutakhir. Daya saing ini juga harus didukung oleh pemberdayaan tenaga kerja dengan keterampilan yang relevan dan kemampuan untuk beradaptasi terhadap perubahan.

3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel

Tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif, dan efisien merupakan bagian tak terpisahkan dari prinsip good governance. Pemakaian tiga kata kunci tersebut dimaksudkan agar penyelenggaraan pemerintahan Kab. Konawe Selatan kedepannya dapat menonjol dalam hal akuntabel, efektif, dan efisien. Tata Kelola pemerintahan perlu terus berbenah dan berorientasi pada pelayanan pemerintahan yang baik. Karenanya misi tata kelola yang akuntabel menjadi penting diarahkan melalui pilar; Kepemimpinan yang Baik, Partisipasi Masyarakat, serta Keterbukaan dan Akuntabilitas. Tata kelola pemerintahan yang akuntabel melibatkan kepemimpinan yang adil dan

berintegritas. Pemimpin pemerintahan diharapkan untuk memimpin dengan teladan, menghindari korupsi, dan bertanggung jawab atas keputusan-keputusan yang diambil. Oleh karena itu, pemerintahan diharapkan mampu mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan. Hal ini menciptakan lingkungan di mana suara masyarakat didengar, hak-hak warga dihormati, dan kebijakan publik mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Tata kelola yang andal ini dilingkupi oleh transparansi dan akuntabilitas yang memberikan akses informasi kepada masyarakat, memastikan bahwa kebijakan dan keputusan pemerintah dapat diawasi, dan bertanggung jawab dalam pengelolaan sumber daya publik. Di sisi lain, tata kelola pemerintahan Konawe Selatan mesti inovatif dengan melibatkan penggunaan teknologi informasi dan inovasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan publik. Pemanfaatan teknologi dapat mencakup e-government, big data, dan solusi digital lainnya. Pemerintahan yang inovatif mampu merespons dengan cepat terhadap perubahan lingkungan dan kebutuhan masyarakat. Ini melibatkan proses pengambilan keputusan yang adaptif dan responsif terhadap tantangan dan peluang yang berkembang. Inovasi juga terkait dengan kemampuan pemerintah untuk berkolaborasi dengan sektor swasta, masyarakat sipil, dan sektor lainnya. Kemitraan yang kuat dapat mendorong ide-ide baru dan pemecahan masalah dengan pendekatan baru yang produktif dan progresif.

4. Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan

Misi ini diarahkan untuk merespons ketimpangan dalam distribusi dan penyerapan hasil pembangunan, serta sejumlah isu lingkungan yang menjadi perhatian di Konawe Selatan. Oleh karena itu, misi ini menitikberatkan pada penyelamatan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Hal ini melibatkan perlindungan ekosistem, pengelolaan yang bijaksana terhadap air, tanah, dan hutan, serta pengurangan dampak negatif terhadap lingkungan. Pembangunan harus mulai memperhatikan penggunaan energi terbarukan dan ramah lingkungan untuk mengurangi jejak karbon serta mendukung transisi menuju energi yang bersih dua dekade ke depan. Pembangunan kewilayahan yang adil menekankan pemerataan akses dan manfaat pembangunan di antara seluruh lapisan masyarakat. Ini termasuk distribusi

pendapatan yang adil, peluang pekerjaan yang merata, serta pemberdayaan kelompok-kelompok rentan atau terpinggirkan. Termasuk di dalamnya adalah distribusi infrastruktur dan layanan yang merata di berbagai wilayah, seperti akses yang setara terhadap pendidikan, kesehatan, transportasi, dan fasilitas umum lainnya. Untuk mencapai misi ini, pembangunan ekonomi di setiap wilayah harus diarahkan untuk mencegah ketidaksetaraan antar daerah. Ini dapat dicapai dengan mengidentifikasi potensi ekonomi lokal dan mendukung inisiatif pengembangan yang sesuai dengan kekhasan masing-masing wilayah. Pengendalian lingkungan hidup dan pengelolaan SDA yang berkelanjutan menjadi dasar perencanaan pembangunan Kabupaten Konawe Selatan. Hal tersebut diupayakan dengan konservasi SDA untuk menjaga ketahanan energi-pangan-air, manajemen pengelolaan lingkungan yang sirkular, serta meningkatkan kapasitas resiliensi terhadap bencana dan krisis iklim. Selain itu juga menjalankan target global dan nasional untuk penurunan GRK, transisi energi terbarukan.

4.3. Program

Program Unggulan Adi Jaya Putra dan James Adam Mokke sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Periode 2025-2030 yaitu :

1. Mewujudkan perekonomian yang berkeadilan dan berkualitas

Kartu Konsel Sejahtera :

- Kartu UMKM Sejahtera
- Kartu Petani Sejahtera
- Kartu Nelayan Sejahtera
- Kartu Peternak Sejahtera

2. Mewujudkan sumber daya manusia yang unggul dan inovatif

- Konsel Sehat (Layanan Kesehatan Keliling)
- Optimalisasi layanan kesehatan, dengan membangun rumah sakit/fasilitas pelayanan kesehatan tambahan; dan menambah kuota jaminan kesehatan (BPJS/JKN)
- Peningkatan kesehatan ibu dan anak, termasuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

- Bantuan Pendidikan (Beasiswa) untuk siswa/mahasiswa berprestasi Tingkat SMA sampai dengan perguruan tinggi dan beasiswa untuk tenaga pengajar yang berprestasi
- Optimalisasi peran Balai Latihan Kerja (BLK) untuk mencetak tenaga-tenaga terampil siap kerja

3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel

- Optimalisasi pemberdayaan perempuan (peningkatan ekonomi kreatif perempuan, peningkatan peran Dasa Wisma, Kader PKK, dan organisasi perempuan lainnya)
- Peningkatan insentif untuk Kepala Desa, Aparat Desa, dan insentif bagi Ibu-Ibu Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di setiap Dasa Wisma, serta insentif bagi tenaga fungsional layanan Masyarakat di lintas sektoral (Penyuluh/Pendamping dan lainnya)
- Optimalisasi manajemen penyelenggaraan jaminan sosial masyarakat (BLT/PKH/BPNT dan lainnya)
- Peningkatan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP)

4. Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan

- Bantuan kepada Pondok Pesantren, Rumah Ibadah, Insentif untuk Imam, Pendeta/Pastor, Pandita/Pinandita dan kegiatan keagamaan lainnya
- Menuntaskan pengaspalan jalan desa/kelurahan
- Peningkatan Infrastruktur Jembatan, Irigasi, Air Bersih dan Sanitasi
- Revitalisasi Kota Andoolo

BAB V. ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK

5.1. Arah Kebijakan

Arah kebijakan Naskah Visi Misi dan Program Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Adi Jaya Putra dan James Adam Mokke Tahun 2025–2030 merupakan arah kebijakan Tahap pertama tahun 2025-2029 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2025-2045, dimana arah kebijakan pembangunan Konawe Selatan difokuskan pada penguatan modal dasar pembangunan sebagai fondasi transformasi. Penguatan modal dasar pembangunan diantaranya fondasi ekonomi, sosial, infrastruktur, kebudayaan dan tata kelola pemerintahan. Fondasi ekonomi diperkokoh dengan mempersiapkan jalan bagi peralihan struktur ekonomi daerah dari sektor primer kearah sektor sekunder dan tersier dimana nilai tambah perekonomian secara agregat mengalami peningkatan secara terus menerus baik pertumbuhan (*growth*) maupun peranannya (*share*). Aspek sosial diperkokoh melalui pendidikan berkualitas dan merata serta pelayanan kesehatan untuk semua. Pada saat yang sama, penguatan basis kebudayaan diperlukan dalam memberikan pemaknaan (*meaningfull*) atas perubahan yang berlangsung, basis kebudayaan yang kokoh dapat mencakup ketahanan budaya, literasi budaya, dan ekspresi budaya. Fondasi transformasi juga ditentukan oleh kapasitas tata kelola pemerintahan dan ketersediaan infrastruktur dasar dan wilayah di Kabupaten Konawe Selatan yang mempertimbangkan struktur ruang wilayah Kabupaten Konawe Selatan yang terdiri atas: (i). sistem perkotaan; dan (ii). sistem jaringan prasarana. Adapun tata kelola pemerintahan mencakup kesiapan pemerintah untuk memanfaatkan ragam keterbaruan teknologi informasi dan digitalisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilakukan.

5.2. Sasaran Pokok

Sasaran pokok Naskah Visi Misi dan Program Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Adi Jaya Putra dan James Adam Mokke Tahun 2025-2030 berpedoman kepada RPJPD Kabupaten Konawe Selatan 2025-2045 yang merupakan abstraksi atas ikhtiar pencapaian pembangunan sebagaimana telah dijabarkan dalam visi dan misi pembangunan jangka panjang dan ikhtisar atas arah kebijakan jangka panjang yang diturunkan kedalam kerangka pembangunan lima tahunan dan terbagi menjadi 4 (empat) periodisasi.


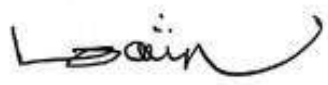
Pencapaian visi jangka panjang Kabupaten Konawe Selatan telah ditetapkan 4 (empat) misi pembangunan dengan sasaran pokok misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan sumber daya manusia unggul dan berdaya saing tinggi
 - a) Meningkatnya kualitas dan akses pendidikan bagi seluruh warga.
 - b) Meningkatnya derajat kesehatan serta akses pelayanan kesehatan bagi seluruh warga.
 - c) Meningkatnya inklusifitas kebudayaan lokal, kualitas keluarga dan kesetaraan gender.
 - d) Meningkatnya daya saing tenaga kerja dan aparatur pemerintah Kabupaten Konawe Selatan.
2. Mewujudkan perekonomian yang berkualitas dan berkelanjutan
 - a) Meningkatnya pertumbuhan dan peranan lapangan usaha utama
 - b) Meningkatnya kesempatan kerja pada lapangan usaha utama.
 - c) Meningkatnya peran lapangan usaha sekunder yang berbasis unggulan dan berkelanjutan
 - d) Menurunnya angka penduduk miskin dan berkurangnya ketimpangan antar kelompok pendapatan dan antar wilayah.
 - e) Meningkatnya UMKM dan kegiatan investasi yang berkualitas
3. Mewujudkan tata kelola yang akuntabel dan inovatif
 - a) Meningkatnya integritas dan adaptabilitas tata kelola pemerintahan,
 - b) Meningkatnya kualitas regulasi daerah.
 - c) Meningkatnya kapasitas fikal daerah.
 - d) Meningkatnya kualitas kebijakan publik.

4. Mewujudkan pembangunan kewilayahan yang adil, merata dan berwawasan lingkungan
 - a) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dasar dan kewilayahan,
 - b) Meningkatnya ketahanan air, energi dan kemandirian pangan.
 - c) Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana dan perubahan iklim.

BAB VI
PENUTUP

Demikian penyampaian Naskah Visi, Misi, dan Program untuk memberikan gambaran kepada masyarakat Konawe Selatan tentang rencana-rencana strategis yang akan dijalankan sebagai Calon Bupati Konawe Selatan dan Calon Wakil Bupati Konawe Selatan Periode 2025-2030, selanjutnya program-program prioritas ini akan dirinci dan dijabarkan secara lebih mendetail pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Konawe Selatan Tahun 2025-2029 yang akan dilengkapi dengan rencana aksi/rencana kerja tahunan dengan target-target capaiannya. Dokumen ini juga dimaksudkan sebagai syarat administratif dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan.

<p>Calon Bupati Konawe Selatan Periode 2025-2030,</p>  <p>ADI JAYA PUTRA, B.Bus, M.Com</p>	<p>Calon Wakil Bupati Konawe Selatan Periode 2025-2030,</p>  <p>JAMES ADAM MOKKE, S.Sos, M.Si</p>
--	--



VISI MISI & PROGRAM UNGGULAN

CALON BUPATI & WAKIL BUPATI
KONAWE SELATAN
2024-2029

HERO

HERMAN HERIANTO



**VISI MISI DAN PROGRAM UNGGULAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KONAWE SELATAN PERIODE 2024-2029**

HERMAN PAMBAHAKO, SH
DAN
H. HERIANTO SUGANDA, SE., M.PW

PENDAHULUAN

Secara astronomis Kabupaten Konawe Selatan terletak antara 30.58.56' dan 4.031.52' lintang Selatan, dan antara 121.58' dan 123.16' bujur Timur. Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Konawe Selatan memiliki batas-batas antara lain :

1. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Konawe dan Kota Kendari;
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Banda dan Laut Maluku;
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bombana dan Muna;
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kolaka dan Kolaka Timur.

Luas wilayah Kabupaten Konawe Selatan adalah 451.421 ha atau 11.83% dari luas wilayah daratan Sulawesi Tenggara, sedangkan luas wilayah perairan (laut) lebih dari 9.268 km²

Secara Administratif, Kabupaten Konawe Selatan adalah salah satu Kabupaten yang berada di provinsi Sulawesi Tenggara. Sebagai Kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Kendari yang disahkan dengan UU Nomor 4 tahun 2003, tanggal 25 Pebruari 2003 dengan ibukota Andoolo.

Kabupaten Konawe Selatan terdiri atas 25 Kecamatan yaitu Tinanggea, Lalembuu, Andoolo, AndooloBarat, Buke, Palangga, Palangga Selatan, Baito, Lainea, Laeya, Kolono, Kolono Timur, Laonti, Moramo, Moramo Utara, Konda, Wolasi, Ranomeeto, Ranomeeto Barat, Landono, Mowila, Sabulakoa, Angata, Benua dan Basala.

Jumlah Penduduk Konawe Selatan adalah 317.826 jiwa dengan laju pertumbuhan 1,71 dengan kepadatan penduduk sebesar 75 jiwa per Km², merupakan daerah dengan penduduk terbanyak ke dua di Sulawesi Tenggara namun dengan tingkat kepadatan ke 7 jika dibandingkan kabupaten kota di Sulawesi Tenggara.



Konawe Selatan adalah daerah yang memiliki potensi yang lengkap, Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Pertambangan mineral, pertambangan batuan dan pasir, perikanan dan pariwisata. Dibarengi dengan jumlah penduduk yang besar, maka selayaknya Konawe Selatan harusnya menjadi Daerah yang maju, makmur dan sejahtera.

Jumlah Penduduk yang besar, potensi Sumber Daya Alam yang lengkap ternyata belum menjadi jaminan Konawe Selatan untuk menjadi Kabupaten yang mandiri. Masih tingginya angka kemiskinan, tingginya angka pengangguran, belum membaiknya kondisi perekonomian masyarakat, profesionalisme aparatur dan sumber daya manusia belum sesuai kompetensi, belum optimalnya pemanfaatan potensi sumber daya alam untuk kesejahteraan, kondisi prasarana infrastruktur yang belum memuaskan, menurunnya kualitas dan daya dukung lingkungan sehingga menyebabkan rawan bencana di Konawe Selatan mengharuskan solusi untuk pembenahannya.

Berdasarkan atas dasar tersebut, maka **Herman Pambahako, SH dan H. HERIANTO SUGANDA, SE., MPW dengan Akronim “HERO”** menyatakan diri untuk maju memimpin Konawe Selatan dengan mengusung

VISI

MEWUJUDKAN KONAWE SELATAN YANG MANDIRI, SEJAHTERA, ADIL, BERBUDAYA, KOMPETITIF, RAMAH LINGKUNGAN DAN INKLUSIF BAGI SEMUA

Pernyataan Visi tersebut di atas mengandung makna dan implikasi bahwa Kabupaten Konawe Selatan dengan segala potensi yang dimilikinya harus menjadi daerah yang

1. Mandiri mengandung makna bahwa Konawe Selatan di bawah kepemimpinan Herman Pambahako akan menjadi daerah yang perlahan-lahan mampu memenuhi kebutuhannya sendiri, mandiri disegala bidang.
2. Sejahtera, mengandung makna bahwa Konawe Selatan akan menjadi daerah dengan pendapatan perkapita yang tertinggi di Sulawesi Tenggara, PDRB yang tinggi, Pertumbuhan ekonomi yang baik serta indeks kesejahteraan yang baik, Gini Rasio yang



rendah dan berbagai angka statistik lainnya yang menunjukkan perbaikan kesejahteraan menjadi lebih baik,

3. Adil, mengandung makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dalam menjalankan kebijakan dan pelayanan publik berorientasi pada kepastian bagi seluruh rakyat Konawe Selatan tanpa memandang Suku, Agama, Ras dan antara golongan serta inklusif bagi seluruh masyarakat dan dapat diakses dengan mudah oleh seluruh golongan.
4. Kompetitif mengandung makna bahwa Konawe Selatan akan menjadi Daerah yang mampu mencetak Sumber daya manusia berkualitas, memiliki pengetahuan, keterampilan dan etos kerja tinggi yang memiliki daya saing tinggi baik di tingkat Daerah, regional, Nasional maupun internasional.
5. Ramah Lingkungan mengandung makna bahwa Konawe Selatan dalam mengelola potensi Sumber Daya Alam yang ada di wilayahnya senantiasa menjunjung tinggi kaidah lingkungan yang baik untuk mencegah terjadinya dampak lingkungan yang memburuk bagi masyarakat Konawe Selatan dengan tetap memberi ruang bagi aktivitas investasi dan produksi,
6. Inklusif mengandung makna bahwa Konawe Selatan akan menjadi daerah yang terbuka dan nyaman bagi seluruh masyarakat tanpa memandang berbagai latar belakang suku, agama, ras dan antar golongan.

MISI

Untuk mewujudkan Visi Konawe Selatan sebagai Kabupaten yang Mandiri, Sejahtera, Adil, Berbudaya, Kompetitif, Ramah Lingkungan dan Inklusif bagi semua akan dicapai melalui misi :

1. Peningkatan dan Pengembangan Kualitas Sumberdaya Manusia, diwujudkan melalui :
 - Peningkatan kualitas sarana pendidikan, tenaga pendidik, kesejahteraan tenaga pendidik khususnya tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Tingkat Pertama di seluruh Wilayah Konawe Selatan.
 - Memastikan tidak ada lagi biaya tambahan bagi anak sekolah tingkat Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Pertama, baik seragam, buku dan sebagainya, kecuali atas keinginan dan kesepakatan orang tua siswa.



- Peningkatan derajat kesehatan dengan memaksimalkan program promotif, kuratif dan mengkampanyekan budaya hidup sehat dan lingkungan bersih bagi masyarakat Konawe Selatan.
 - Program pelatihan untuk Peningkatan dan pengembangan kualitas SDM melalui program vokasi
 - Meningkatkan kenyamanan dan kebebasan umat beragama
 - Mengembangkan ekonomi kreatif dan digitalisasi melalui pendidikan khusus
 - Menciptakan Konawe Selatan bebas wifi diseluruh area publik
2. Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik (Good Governance) dan Pemerintahan yang bersih (Clean Governance) akan ditempuh melalui :
- Penyelenggaraan Pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik yang baik dengan memenuhi prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, efektif dan efisien dan menghindari praktek-praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dengan dukungan Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik (SPBE)
 - Pemanfaatan teknologi Informatika untuk memaksimalkan *E-Planing, E-Budgeting dan E-Controlling* yang memberi ruang bagi partisipasi masyarakat
 - Mengembangkan instrumen penilaian masyarakat atas pelayanan publik secara berkala untuk kebutuhan perbaikan layanan.
 - Sistem Rekrutmen pejabat yang transparan dengan memberi ruang atas partisipasi masyarakat
 - Kemudahan pelayanan bagi masyarakat dengan mengusung prinsip *Excellent Service* bagi seluruh pengguna layanan.
 - Memfasilitasi Kendaraan Roda Empat untuk Operasional Pemerintah Desa
 - Mempertegas dan sekaligus menjalankan instrumen penilain pejabat SKPD berdasarkan *job description*, kepatutan dan target kinerja yang telah ditetapkan berikut dengan sistim *punish and reward*
3. Membangun Ekonomi sesuai dengan potensi wilayah Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. Misi ini dicapai melalui :

- Pengembangan infrastruktur dasar dan infrastuktur yang berkontribusi pada percepatan produktivitas masyarakat sesuai dengan potensi lokal seperti infrastruktur jalan, pelabuhan, bendungan dan lain-lainnya.
- Membangun iklim investasi yang kondusif dan memudahkan bagi dunia usaha
- Pengembangan UMKM berbasis pada potensi lokal yang berorientasi pada pasar yang lebih luas
- Memfasilitasi dan membangun sentra-sentra pengembangan ekonomi baru melalui kolaborasi *konsep hilirisasi* sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, pariwisata dan ekonomi kreatif.
- Identifikasi dan penyelesaian segera permasalahan yang menghambat pengembangan ekonomi masyarakat
- Revitalisasi Fungsi Perusahaan Daerah sebagai Incubator usaha dan program kolaboratif bersama BUMDES

PROGRAM UNGGULAN

Dalam rangka menjalankan misi, maka program unggulan yang akan dijalankan, adalah :

1. Memperkuat dan menyempurnakan pendidikan gratis bagi sekolah dasar dan sekolah menengah pertama
2. Beasiswa untuk siswa berprestasi disegala jenjang
3. Penyediaan layanan Kesehatan yang baik secara gratis dengan mengembangkan program “*Konsel Mandiri* “ untuk mengcover warga yang belum tercover oleh program kesehatan gratis Pemerintah Pusat.
4. Seluruh Puskesmas di naikkan statusnya menjadi Puskesmas rawat inap sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama dengan pelayanan yang baik dan berkualitas
5. Memastikan satu Keluarga Satu Lapangan Pekerjaan.
6. Peningkatan kesejahteraan tenaga medis, PPL dan tenaga pendidik, utamanya non ASN
7. Memastikan sistim Kontrak Tenaga P3K untuk durasi waktu lima tahun
8. Mengembangkan UMKM dengan merevitalisasi fungsi Perusahaan Daerah sebagai Inkubator usaha yang mesinergikan berbagai potensi yang ada di Konawe Selatan



9. Membentuk sentra pertumbuhan ekonomi yang kuat di Wilayah Konawe Selatan untuk menunjang kebutuhan ASN
10. Memfasilitasi terciptanya kebun sawit yang baru dengan memberi insentif terhadap pembuatan dan penanaman kelapa sawit untuk masyarakat konawe selatan dengan target seluas 2.500 Ha dalam 5 tahun
11. Peningkatan Kesejahteraan bagi aparat desa dengan menaikkan honor aparat menjadi 1.500.000,- / Orang / bulan
12. Memfasilitasi kendaraan Empat Roda untuk Operasional Pemerintah Desa
13. Mengembangkan Fungsi dan peran BUMDES sebagai lembaga ekonomi desa dengan memberi stimulus berupa peningkatan keterampilan, pengetahuan bagi pengelola dan juga kemudahan permodalan usaha.
14. Bantuan perumahan bagi warga Miskin
15. Asrama Mahasiswa Konawe Se'atan di Kota Kendari
16. Penyelesaian Masalah lahan Ex Transmigrasi pada 100 hari Pertama
17. Menambah Kuota Sertifikasi lahan bagi masyarakat Konawe Selatan (Prona)
18. Pengelolaan sampah dibawah kendali BUMDES
19. Menciptakan iklim investasi yang sehat bagi dunia berusaha dan memfasilitasu program hilirisasi berbagai potensi yang ada di Konawe Selatan
20. Menjalankan pendidikan vokasi untuk memenuhi kebutuhan lapangan pekerjaan
21. Memfasilitasi kemudahan berusaha dan peluang pasar bagi pelaku UMKM yang mengembangkan potensi lokal dengan Membangun kerja sama antar daerah.
22. Mengembangkan sistim Perencanaan dan Monev secara Partisipatif untuk penilaian dan perbaikan sistim perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan demi menciptakan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Keseluruhan Visi-Misi dan Program Kerja Pasangan Herman Pambahako, SH dan H. Herianto Suganda, SE, MPW dikemas dalam satu akronim yaitu “HERO” dengan uraian sebagai berikut :

- H : Humanis, memastikan bahwa Pemerintahan dibawah kepemimpinan HERO ini akan dijalankan secara humanis dan penuh dengan suasana kekeluargaan, setara dan terbuka bagi seluruh warga Konawe Selatan
- E : Empatik, mengandung makna bahwa Pemerintahan dibawah Kepemimpinan HERO didasari oleh rasa empati atau peduli untuk kesejahteraan Rakyat Konawe Selatan
- R : Responsif, mengandung makna bahwa Pemerintahan dibawah kepemimpinan HERO akan memastikan pengambilan keputusan yang cepat, efektif, terukur dan efisien terhadap setiap permasalahan yang ada di Konawe Selatan
- O : Optimis, Mengandung makna bahwa Pemerintahan dibawah kepemimpinan HERO adalah pemerintahan yang optimis akan memajukan Konawe Selatan dan meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat dan warga Konawe Selatan.

Demikianlah Visi-Misi dan Program Unggulan ini di buat, Semoga Allah SWT meridhai perjuangan ini.

Andoolo, 27 Agustus 2024

Calon Bupati

Calon Wakil Bupati

HERMAN PAMBAHAKO, SH

H. HERIANTO SUGANDA, SE., M.PW





PDI PERJUANGAN



PBB



PAN
PARTAI AMANAT NASIONAL



PPP



PKB

HERO

HERMAN HERIANTO





VISI, MISI, & PROGRAM KERJA

RANGKUL RAKYAT

KITA SEDERAJAT

**RADHAN
RASYID!**



H. Muhammad Radhan Al Gindo Nur Alam, S.H

**Calon Bupati
Konawe Selatan
2024 - 2029**

Seorang politisi muda yang gemar turun langsung ke masyarakat dan desa-desa untuk mendengar dan belanja masalah.

Radhan aktif menulis di media dan berkeliling turun tangan di berbagai kegiatan kemasyarakatan dan kepemudaan di kampung halamannya, Konawe Selatan.

Sebagai putra daerah, Radhan berikhtiar untuk terus melanjutkan perjuangan Bapak Nur Alam berbakti kepada masyarakat.

Baginya, bekal pendidikan politik yang diperoleh sejak kecil membuat Radhan sebagai pemuda, mampu untuk mengambil peran strategis berjuang membangun Konawe Selatan.



**Rasyid,
S.Sos.,
M.Si**

**Calon Wakil Bupati
Konawe Selatan
2024 - 2029**

Rasyid adalah Wakil Bupati Konawe Selatan petahana sejak tahun 2020.

Pengalamannya sebagai politisi telah merentang masa. Selama empat periode, Rasyid terus menjabat sebagai anggota DPRD Sulawesi Tenggara sejak tahun 2004.

Pengalaman panjang ini membuat Rasyid menjadi tokoh senior yang sangat siap untuk mendampingi Radhan Nur Alam memimpin Konawe Selatan.

Bersama dengan Radhan, akan turut berjuang membangun Konawe Selatan.

Visi

Konawe Selatan sebagai sentra peternakan, kelapa sawit, dan perikanan nomor satu di Indonesia Timur untuk masyarakat yang lebih maju dan sejahtera.

Misi

1

Konawe Selatan yang warganya makmur, sehat, cerdas, dan berbudaya dengan generasi muda sebagai motor penggerak utama dimana 10.000 lapangan kerja baru tercipta

2

Konawe Selatan yang menjadi sentra ekonomi dan industri peternakan sapi Indonesia Timur

3

Konawe Selatan yang menjadi sentra kelapa sawit, pertanian, dan perikanan Indonesia Timur

4

Konawe Selatan yang jalan-jalannya mulus, jembatan-jembatan terbangun, dengan pembangunan yang berkelanjutan serta tangguh bencana

PROGRAM UNGGULAN

RANGKUL RAKYAT KITA SEDERAJAT

1. **Konsel Sentra Sapi: 1 Desa 1 Peternakan Sapi**

- Pengembangan sentra peternakan berskala besar
- Pengembangan industri produk-produk turunan susu dan sapi dan pusat penelitian pengembangan produk sapi
- Asuransi peternakan serta optimalisasi BUMDes dan koperasi peternakan sapi
- Beasiswa pendidikan peternakan

2. **Konsel Sentra Sawit: 1 keluarga petani sawit 1 kupon bantuan bibit varietas unggul**

- Pengembangan industri produk-produk turunan Kelapa Sawit
- Dana royalti sawit untuk peningkatan anggaran pembangunan Konawe Selatan
- Optimalisasi BUMDes dan koperasi kelapa sawit
- Beasiswa pendidikan perkebunan

3. **Konsel Sentra tani: 1 keluarga petani 1 kupon pupuk murah**

- Program *One Village One Product*: Mendorong tiap desa untuk memiliki 1 buah produk unggulan pertanian yang berkualitas dan berdaya saing
- Membangun Sentra Agrowisata terpadu
- Pemberian bantuan traktor dan alat mesin pertanian di setiap desa
- Asuransi pertanian serta optimalisasi BUMDes dan koperasi pertanian
- Beasiswa pendidikan pertanian

4. **Konsel Sentra Perikanan: 1 keluarga nelayan
1 kupon bantuan modal perikanan**

- Kawasan Minapolitan di Pesisir Konawe Selatan: Pengembangan sentra perikanan terpadu
- Pemberian bantuan sarana-prasarana perikanan
- Asuransi nelayan serta optimalisasi BUMDes dan koperasi perikanan
- Beasiswa pendidikan perikanan

5. **Menghadirkan 10.000 lapangan kerja baru di bidang peternakan, kelapa sawit, dan perikanan bagi anak-anak muda Konsel**

6. **Bantuan usaha bagi pelaku UMKM dan pedagang pasar**

7. **Dialog terbuka “Rangkul Rakyat” 1 minggu 1 desa: Bupati/Wakil Bupati menyerap langsung aspirasi warga**

8. **Perbaiki jalan rusak di 100 hari pertama!**

9. **Konsel menuju *zero* stunting dan *zero* kemiskinan ekstrem**

MISI 1

KONAWA SELATAN YANG WARGANYA MAKMUR, SEHAT, CERDAS, DAN BERBUDAYA DENGAN GENERASI MUDA SEBAGAI MOTOR PENGGERAK UTAMA DIMANA 10.000 LAPANGAN KERJA BARU TERCIPTA



AGENDA MISI 1

- 1.1 Menghadirkan 10.000 lapangan kerja baru khususnya di bidang peternakan, kelapa sawit, perikanan, dan pertanian bagi anak-anak muda Konawe Selatan.
- 1.2 Memastikan pengurangan signifikan angka stunting di Konawe Selatan dalam lima tahun ke depan
- 1.3 Memastikan penurunan angka kemiskinan ekstrem secara tajam dalam lima tahun ke depan
- 1.4 Memberikan beasiswa khusus bagi 100 anak muda Konawe Selatan yang mendalami bidang peternakan, perkebunan, pertanian, atau perikanan.
- 1.5 Mendorong pengusaha muda untuk berkarya melalui program pelatihan kewirausahaan, bantuan permodalan, dan penyediaan inkubator bisnis.
- 1.6 Mendorong kemajuan koperasi sebagai wadah anak muda dalam mengembangkan usaha dan membangun jiwa kewirausahaan.
- 1.7 Memajukan kualitas pendidikan di Konawe Selatan untuk menciptakan sumber daya manusia yang kompeten dan berdaya saing melalui peningkatan kualitas dan kesejahteraan guru dan pengajar, peningkatan kualitas fasilitas pendukung pendidikan, serta menjamin ketersediaan bangku sekolah.
- 1.8 Meningkatkan akses layanan kesehatan yang merata dan berkualitas bagi seluruh masyarakat Konawe Selatan melalui pembangunan puskesmas tiap kecamatan, layanan kesehatan gratis, dan peningkatan jumlah tenaga medis.
- 1.9 Meningkatkan kesejahteraan masyarakat kurang mampu serta pengentasan kemiskinan ekstrem di Konawe Selatan hingga 0% dalam 5 tahun, termasuk penyaluran bantuan sosial serta program pengembangan balai latihan kerja dan bantuan modal usaha.
- 1.10 Menjalankan dialog terbuka “Rangkul Rakyat” 1 minggu 1 desa dimana bupati/wakil bupati turun langsung untuk menyerap aspirasi warga.
- 1.11 Memberikan dukungan bagi para penggiat agama dan pelaku adat bagi seluruh agama dan kelompok adat yang ada di Konawe Selatan.
- 1.12 Meningkatkan kesejahteraan dan memberikan dukungan usaha bagi pelaku UMKM dan pedagang pasar.



RSUD Bahteramas, salah satu hasil dari program Nur Alam sewaktu menjabat menjadi Gubernur Sultra

MISI 2

KONAWE SELATAN YANG MENJADI SENTRA EKONOMI DAN INDUSTRI PETERNAKAN SAPI INDONESIA TIMUR



AGENDA MISI 2

2.1 Program bantuan 1 desa 1 peternakan sapi untuk meningkatkan produksi ternak sapi dan pendapatan masyarakat pedesaan di Konawe Selatan.

2.2 Meningkatkan skala produksi dan efisiensi peternakan di Konawe Selatan melalui pembangunan fasilitas fisik, pembangunan rumah potong sapi modern, perbaikan jalan dan jalur logistik integrasi ke pasar terdekat.

2.3 Mengembangkan hilirisasi pada produk-produk turunan hasil ternak melalui pembangunan industri pengolahan daging dan produk turunannya.

2.4 Mengembangkan peternakan sapi berskala besar, khususnya di kawasan-kawasan potensial.

2.5 Memberikan asuransi perlindungan terhadap risiko usaha peternakan seperti penyakit, kematian ternak, dan bencana alam.

2.6 Memberikan bantuan sarana prasarana dan pakan ternak melalui program penyediaan fasilitas kandang dan pakan ternak, distribusi pakan ternak berkualitas, dan pelatihan teknis bagi peternak.

2.7 Mengoptimalkan peran koperasi dan BUMDes untuk pengembangan sektor peternakan sapi berbasis masyarakat di desa-desa Konawe Selatan.



MISI 3

KONAWE SELATAN YANG MENJADI SENTRA KELAPA SAWIT, PERTANIAN, DAN PERIKANAN INDONESIA TIMUR



AGENDA MISI 3

3.1 Menyediakan program 1 keluarga petani sawit 1 paket bantuan bibit varietas unggul, serta program bantuan lainnya berupa:

- Program kemitraan antara perusahaan perkebunan dan petani lokal untuk pengembangan lahan sawit,
- Pelatihan budidaya sawit bagi para petani,
- Penggunaan dana royalti sawit untuk tambahan anggaran pembangunan

3.2 Menyediakan program 1 keluarga petani 1 kupon pupuk murah, serta program-program lainnya berupa:

- Program 1 buah produk unggulan pertanian yang berkualitas dan berdaya saing (*one village one product*) untuk mempermudah petani mendapatkan hasil tani
- Pembangunan sentra agrowisata dan kawasan agropolitan
- Pemberian bantuan traktor dan alat mesin pertanian di setiap desa
- Asuransi pertanian untuk kepastian harga dan gagal panen.

3.3 Menyediakan program 1 keluarga nelayan 1 kuota bantuan modal perikanan, serta program lainnya berupa:

- Pembangunan kawasan Minapolitan di Pesisir Konawe Selatan,
- Pemberian program bantuan sarana-prasarana perikanan
- Asuransi nelayan untuk kepastian harga dan risiko kecelakaan melaut.

3.4 Mengoptimalkan peran koperasi dan BUMDes untuk pengembangan sektor peternakan sapi berbasis masyarakat di desa-desa Konawe Selatan.

3.5 Mengembangkan varietas benih unggul Konawe Selatan melalui penelitian dan pengembangan.



MISI 4

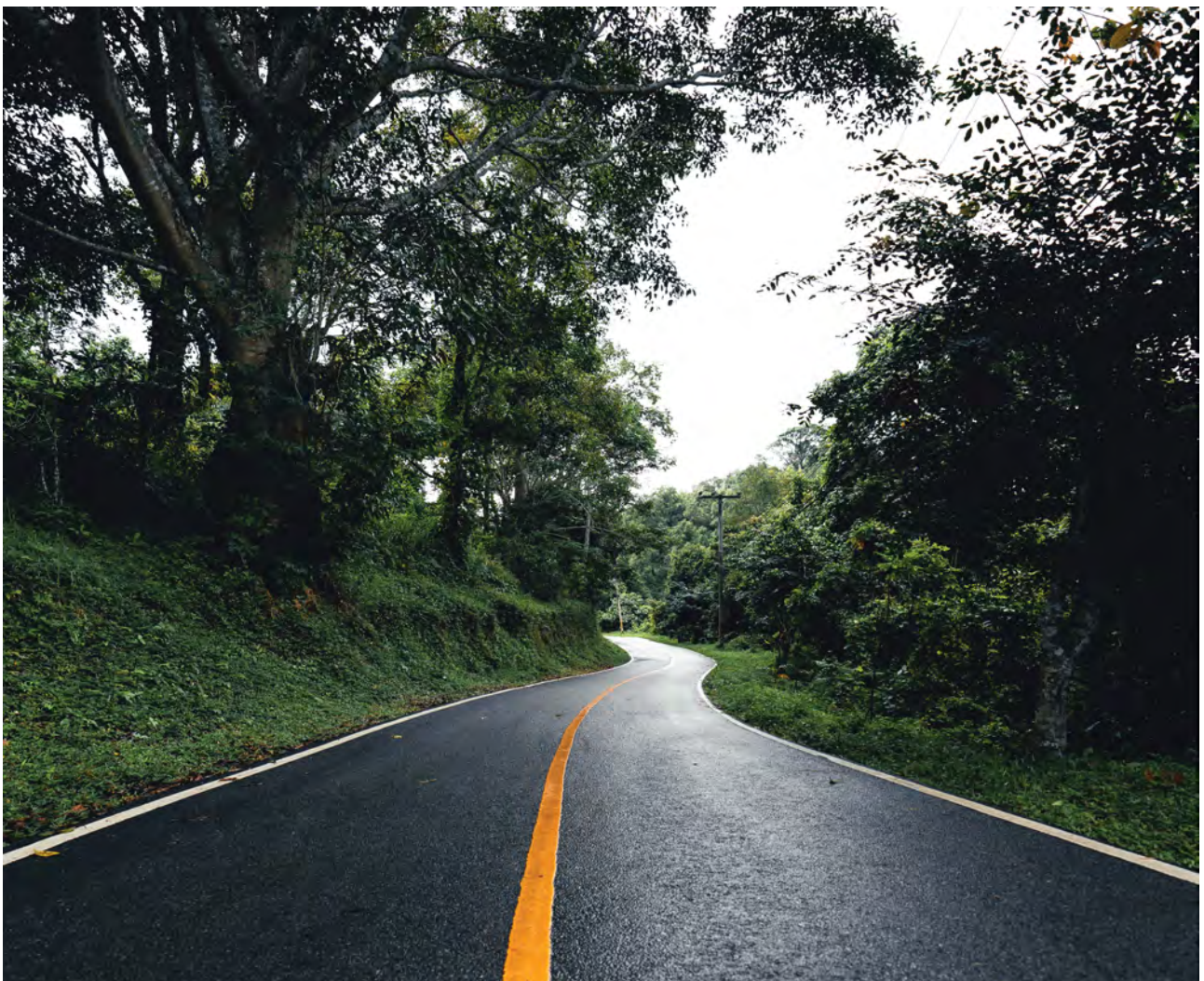
KONAWE SELATAN YANG JALAN-JALANNYA MULUS, JEMBATAN-JEMBATAN TERBANGUN, DENGAN PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN SERTA TANGGUH BENCANA



Jembatan Bahteramas, salah satu maha karya H. Nur Alam sewaktu menjabat menjadi Gubernur Sultra.

AGENDA MISI 4

- 4.1 Menjadikan perbaikan jalan jalan prioritas 100 hari pertama dan memastikan jalan dan jembatan di Konawe Selatan dalam kondisi baik melalui program pengaduan langsung dan respon cepat perbaikan jalan.
- 4.2 Menghubungkan desa-desa yang belum terhubung dengan jaringan jalan melalui pembangunan jalan baru.
- 4.3 Merevitalisasi daerah aliran sungai dan resapan hijau untuk menangkal banjir dan membangun ratusan kolam retensi serta embung-embung baru.
- 4.4 Menginisiasi Konsel Siaga Warga Waspada dengan membentuk puluhan pos siaga bencana di seluruh kecamatan, pelatihan mitigasi bencana untuk ribuan relawan dan warga, dan pembangunan sistem peringatan dini di titik rawan bencana.
- 4.5 Mengembangkan kawasan-kawasan ekonomi baru di Konawe Selatan.
- 4.6 Menghubungkan Konawe Selatan dengan sistem logistik dan rantai pasok nasional dan regional, khususnya di Kawasan Indonesia Timur.



**RADHAN
RASYID!**

**RANGKUL RAKYAT
KITA SEDERAJAT**





VISI, MISI & PROGRAM KERJA

Calon Bupati & Wakil Bupati Konawe Selatan, 2025-2030



IRHAM KALENGGO, S.Sos, M.Si H. WAHYU ADE PRATAMA IMRAN, SH

2024

VISI

Untuk mencapai cita-cita dan harapan Konawe Selatan yang maju dan setara, maka visi Calon Bupati Irham Kalenggo dan Calon Wakil Bupati Wahyu Ade Pratama Imran adalah:

"Menuju Konawe Selatan SETARA. Sehat, Cerdas dan Sejahtera"

Penjabaran makna kalimat visi:

- MENUJU** : Mengandung makna mengarah pada kondisi yang lebih baik.
- KONAWA SELATAN SETARA** : Mengandung makna keadaan sejajar. Seajar dengan wilayah kabupaten lain yang telah maju, tumbuh dan berkembang di Provinsi Sulawesi Tenggara, serta kesamaan terhadap perlakuan antar wilayah dan antar komunitas/kelompok masyarakat yang majemuk dalam kesempatan, akses dan hak sebagai masyarakat Konawe Selatan, untuk berperan dan berpartisipasi serta menikmati hasil pembangunan.
- SEHAT** : Mengandung makna memajukan pembangunan sektor kesehatan dan memperkuat sistem kesehatan masyarakat serta meningkatkan ruang kolaborasi bagi para pihak dan partisipasi masyarakat guna mewujudkan masyarakat Konawe Selatan yang sehat.
- CERDAS** : Mengandung makna mewujudkan dan membentuk masyarakat Konawe Selatan yang andal, cerdas komprehensif, yaitu cerdas spritual, cerdas emosional dan cerdas intelektual serta memiliki keunggulan kompetitif, melalui penyediaan sistem pendidikan yang terjangkau, berkualitas dan berdaya saing.
- SEJAHTERA** : Mengandung makna mewujudkan kualitas hidup masyarakat Konawe Selatan secara layak, melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat pada berbagai aspek kehidupan.

5 (LIMA) PROGRAM UNGGULAN

Program Unggulan adalah rangkaian langkah-langkah program strategis daerah yang dilaksanakan secara terpadu dan sistematis, dibuat dalam rentang waktu yang telah ditentukan untuk pencapaian keunggulan daerah.

Calon Bupati Irham Kalenggo dan Calon Wakil Bupati Wahyu Ade Pratama Imran merumuskan 5 (lima) Program Unggulan dalam Periode Tahun 2025-2030, meliputi:

1. Penyediaan jaminan kesehatan gratis bagi masyarakat Konawe Selatan.
2. Penyediaan biaya Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP)/Uang Kuliah Tunggal (UKT) mahasiswa secara gratis.
3. Penyediaan pakaian seragam Sekolah Dasar (SD)/Sekolah Menengah Pertama (SMP) secara gratis.
4. Peningkatan honorarium aparat desa dan perangkat desa.
5. Penyediaan pupuk murah bagi petani dan/atau alat tangkap bagi nelayan.

MISI

Visi Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati akan diwujudkan melalui 9 (sembilan) misi atau disebut Nawacita, yang merupakan langkah konkret untuk mewujudkan perubahan menuju Konawe Selatan yang lebih maju, setara, sehat, cerdas dan sejahtera, yaitu:

1. Meningkatkan pembangunan dan kualitas layanan infrastruktur dasar wilayah serta konektivitas wilayah secara terintegrasi, dalam rangka keadilan dan pemerataan pembangunan, menciptakan kemandirian desa dan mencegah disparitas wilayah.
2. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
3. Menjamin pelayanan kesehatan dasar masyarakat secara prima, berkeadilan dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat melalui peningkatan akses kesehatan.
4. Mendorong pola dan perilaku hidup sehat masyarakat dalam mengelola kesehatan dan pembangunan kesehatan masyarakat desa yang tangguh.

5. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, andal, produktif, religius dan berbudaya melalui penyelenggaraan pendidikan formal dan non-formal serta penguasaan teknologi informasi.
6. Menggalakkan pertumbuhan ekonomi dan investasi yang berkeadilan dalam rangka peningkatan kelayakan kualitas hidup, pengentasan kemiskinan serta memperluas kesempatan kerja bagi seluruh masyarakat Konawe Selatan.
7. Membangun perekonomian masyarakat yang kreatif, inovatif dan berdaya saing berbasis pada pemberdayaan masyarakat.
8. Pembangunan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
9. Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kualitas hidup masyarakat.

PROGRAM KERJA

Seluruh Misi tersebut akan dijabarkan, dalam bentuk agenda dan program kerja sebagai berikut:

NAWACITA I

Meningkatkan pembangunan dan kualitas layanan infrastruktur dasar wilayah serta konektivitas wilayah secara terintegrasi, dalam rangka keadilan dan pemerataan pembangunan, menciptakan kemandirian desa dan mencegah disparitas wilayah

MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DAN KUALITAS LAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR WILAYAH

- Membangun dan memperbaiki infrastruktur jalan yang merupakan kewenangan kabupaten, serta melakukan koordinasi terhadap pihak pemerintah lainnya mengenai kondisi dan aksesibilitas jalan yang berada dalam wilayah administrasi kabupaten, berdasarkan kewenangan jaringan jalan.
- Optimalisasi pengelolaan dan pengembangan sumber daya air oleh pemerintah melalui penguatan dan peningkatan fungsi serta kapasitas Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
- Pengeboran air tanah dangkal dan tanah dalam di lingkungan permukiman masyarakat.

- Meningkatkan kuantitas dan kualitas air Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sesuai dengan standar kesehatan.
- Merevitalisasi jaringan irigasi dan bendungan sebagai sumber air baku pertanian lahan basah dan untuk pencegahan banjir.
- Menghadirkan dan meningkatkan akses listrik yang andal ke seluruh wilayah perdesaan melalui Program Bantuan Pasang Baru Listrik yaitu penyambungan listrik untuk rumah tangga yang tidak mampu dan belum berlistrik.
- Membangun infrastruktur digital atau teknologi komunikasi secara merata di wilayah kabupaten untuk meningkatkan komunikasi dan akses internet serta mencegah adanya area yang mengalami ketiadaan akses layanan informasi dan komunikasi (*blank spot*).

MENCIPTAKAN KEMANDIRIAN DESA

- Menjamin tersedianya akses kebutuhan prasarana dasar (air bersih, sanitasi) dan prasarana lainnya, terutama bagi kelompok masyarakat miskin di perdesaan dan di wilayah pulau (masyarakat rentan).
- Memperbaiki sistem tata kelola dan pemanfaatan dana desa secara tepat sasaran, transparan dan akuntabel untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran masyarakat desa.
- Mendorong kemandirian bagi masyarakat rentan agar dapat meningkatkan taraf kesejahteraan hidupnya melalui program pemberdayaan, bantuan dan kemitraan.
- Meningkatkan kuantitas dan kualitas program bantuan sosial seperti program pangan, sandang, papan, pendidikan, dan pelayanan dasar bagi kelompok masyarakat kurang mampu.
- Meningkatkan dan menguatkan peran perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas melalui program pembangunan perdesaan menuju desa maju dan mandiri.

MENCEGAH DISPARITAS WILAYAH

- Meningkatkan aksesibilitas transportasi antar wilayah perdesaan dan sentra produksi, wilayah perbatasan, wilayah terpencil maupun kepulauan serta wilayah perkotaan.

- Pembangunan perekonomian pada sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan yang dilaksanakan berbasis kawasan, sehingga menjadi lebih tertata, dan fokus sesuai dengan tipologi dan potensi masing-masing wilayah.
- Mendorong pembangunan kawasan strategis seperti Kawasan Industri, Kawasan Ekonomi Khusus, dan Kawasan Destinasi Pariwisata Prioritas penunjang kawasan perdesaan, sebagai episentrum pertumbuhan ekonomi kemasyarakatan.

NAWACITA 2

Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

- Peningkatan pelayanan kesehatan yang berkualitas, adil dan merata melalui penyediaan sarana dan prasarana kesehatan yang layak, yang menjadi kebutuhan di setiap wilayah desa/kelurahan dan kecamatan, termasuk peningkatan mutu pelayanan medis rumah sakit umum daerah.
- Penyediaan tenaga medis dan tenaga kesehatan di setiap fasilitas layanan kesehatan berdasarkan jenjangnya, dalam rangka peningkatan mutu layanan dan profesionalisme di bidang kesehatan.
- Meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi kesehatan maupun informasi pelayanan fasilitas kesehatan.
- Melakukan program perlindungan sosial dan kesehatan bagi seluruh masyarakat, termasuk tindakan pencegahan dan penanggulangan *stunting* dan gizi buruk.
- Penyediaan obat-obatan yang terjangkau untuk masyarakat dan alat kesehatan penunjang medik dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat.

NAWACITA 3

Menjamin pelayanan kesehatan dasar masyarakat secara prima, berkeadilan dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat melalui peningkatan akses kesehatan

- Memperkuat Sistem Jaminan Kesehatan Daerah dan mengupayakan seluruh masyarakat memiliki jaminan kesehatan.
- Memastikan ketersediaan pelayanan tenaga medis dan kebutuhan obat pada fasilitas pelayanan kesehatan, baik di rumah sakit maupun di Puskesmas.

- Penguatan *database* fasilitas kesehatan, yang meliputi: *database* rumah sakit umum daerah dan Puskesmas pada masing-masing wilayah kecamatan.

NAWACITA 4

Mendorong pola dan perilaku hidup sehat masyarakat dalam mengelola kesehatan dan pembangunan kesehatan masyarakat desa yang tangguh

- Peningkatan kualitas hunian masyarakat menuju hunian sehat dan layak.
- Menggalakkan program hidup sehat masyarakat untuk pencegahan penyakit dan kesehatan lingkungan melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- Penyuluhan kesehatan masyarakat.
- Pencegahan penularan penyakit endemik.
- Program Perbaikan Gizi Masyarakat
- Revitalisasi dan pembinaan Tanaman Obat Keluarga (TOGA).
- Pengembangan media promosi dan informasi Sadar Hidup Sehat.
- Pengembangan Program Desa Sehat.
- Pemeliharaan dan pengawasan kualitas lingkungan.
- Pembangunan pusat olahraga pada pusat wilayah kecamatan (lapangan sepak bola dan/atau lapangan futsal serta sarana olahraga lainnya), yang dikelola dengan skema tertentu sehingga kemanfaatannya lebih besar bagi komunitas olahraga lokal.
- Mendorong gerakan untuk menggiatkan olahraga masyarakat dan menghidupkan kompetisi olahraga antar desa, antar sekolah, dan antar instansi untuk meningkatkan kesehatan, kekeluargaan dan produktivitas masyarakat.

NAWACITA 5

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, andal, produktif, religius dan berbudaya melalui penyelenggaraan pendidikan formal dan non-formal serta penguasaan teknologi informasi

- Peningkatan kualitas serta kuantitas sarana dan prasarana pendidikan secara layak dan merata berdasarkan jenjang pendidikan.

- Membangun taman baca masyarakat untuk mendorong gerakan literasi.
- Menyediakan bantuan pendidikan bagi seluruh mahasiswa putra-putri petani, nelayan, guru dan buruh, untuk melanjutkan pendidikan jenjang SI hingga jenjang S3, melalui sokongan dana yang bersumber dari pemerintah dan pihak lainnya, bagi peserta didik yang unggul, inovatif dan berprestasi dalam bidang akademik.
- Meningkatkan kualitas pendidikan keagamaan seperti pondok pesantren dan memberikan beasiswa bagi para santri untuk melanjutkan pendidikan baik di tingkat nasional maupun internasional, untuk jenjang SI hingga S3.
- Meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui berbagai pelatihan kerja yang bersertifikasi.
- Melakukan revitalisasi Balai Latihan Kerja (BLK) melalui penerapan keahlian (*skill*) berbasis kompetensi guna meningkatkan kualitas tenaga kerja yang produktif dan berdaya saing.
- Meningkatkan kerja sama antara pemerintah daerah, lembaga pendidikan dan pihak swasta dalam pemanfaatan dan peningkatan sektor digital teknologi dan informasi.
- Menguatkan peran, fungsi dan kelembagaan yang terkait dengan upaya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Mengembangkan dan melindungi adat, bahasa daerah, serta budaya tradisional yang terancam punah akibat kurangnya regenerasi, rendahnya frekuensi pertunjukan budaya, dan minimnya sarana prasarana pendukungnya.

NAWACITA 6

Menggalakkan pertumbuhan ekonomi dan investasi yang berkeadilan dalam rangka peningkatan kelayakan kualitas hidup, pengentasan kemiskinan serta memperluas kesempatan kerja bagi seluruh masyarakat Konawe Selatan

- Penyediaan infrastruktur pertanian dan perikanan yang memadai, secara khusus bagi petani dan nelayan melalui kemudahan akses komponen pertanian dan sistem pengolahan pertanian, perikanan dan industri sektor tersebut secara cerdas dan modern, sehingga mampu memberikan nilai tambah produksi dan nilai tambah lainnya.
- Meningkatkan produktivitas pertanian dan perikanan melalui penyediaan sarana prasarana pendukung sektor tersebut, teknologi pangan dan perikanan terpadu, mekanisasi pertanian, dan memperbaiki tata kelola rantai nilai hasil produksi pertanian dan perikanan.

- Menjamin ketersediaan dan akses pupuk bagi petani untuk meningkatkan produksi, produktivitas panen dan hasil pertanian, serta pendapatan dan kesejahteraan petani.
- Modernisasi sistem pertanian melalui inovasi teknologi tepat guna, terutama bagi komoditas pertanian strategis.
- Menjaga stabilitas harga hasil produksi pertanian di tingkat petani.
- Menjamin harga pangan yang terjangkau dan berkelanjutan, bagi para petani dan nelayan serta terjangkau oleh konsumen.
- Memberikan kemudahan dan meningkatkan akses keuangan yang terjangkau bagi para petani dan nelayan, untuk mendorong pertumbuhan usaha dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- Peningkatan kapasitas petani dan nelayan melalui program pelatihan, termasuk sistem kelembagaannya.
- Mengidentifikasi peluang investasi, mengumpulkan data dan informasi terkait penanaman modal, serta merumuskan kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan investasi daerah.
- Membangun kemitraan strategis yaitu Kemitraan Publik-Privat yang saling menguntungkan dan mendorong kolaborasi dalam pengembangan ekonomi desa.
- Pengembangan Program Insentif melalui kemudahan perizinan, dukungan infrastruktur, atau bentuk-bentuk lainnya yang menarik bagi para investor untuk berinvestasi di daerah.

NAWACITA 7

Membangun perekonomian masyarakat yang kreatif, inovatif dan berdaya saing berbasis pada pemberdayaan masyarakat

- Menggalakkan gerakan ekonomi kerakyatan di tingkat desa dan/atau kecamatan untuk memperkuat produk-produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), melalui pengembangan Program UMKM Berdaya Saing dengan memberikan pelatihan dan pendampingan kepada pemilik UMKM agar dapat mengembangkan bisnis mereka dan meningkatkan kualitas produk yang mereka tawarkan, termasuk memberikan kemudahan akses pasar *on-line* dan *off-line* untuk mempromosikan produk-produk lokal.

- Pengembangan kerajinan industri kerajinan kayu, bambu dan rotan melalui program pemberdayaan masyarakat.
- Melindungi dan melakukan revitalisasi pasar tradisional dan menjaga ekosistem pasar rakyat.
- Mengadakan dan mengembangkan berbagai pelatihan tentang ekonomi kreatif dan keterampilan digital yang berbasis pada ide dan karya seni bagi para kaum muda.
- Pemanfaatan dan pengolahan limbah sampah menjadi bahan bernilai ekonomis.

NAWACITA 8

Pembangunan lingkungan hidup yang berkelanjutan

- Pemulihan dan pengembalian fungsi ekologis lahan produktif pertanian.
- Melindungi keanekaragaman hayati flora dan fauna berdasarkan kearifan lokal yang berlaku.
- Meningkatkan pengawasan potensi kebakaran dan perambahan hutan melalui peran serta multipihak.
- Merancang program pencegahan, mitigasi dan penanggulangan bencana, termasuk melakukan penyediaan dan pemuktahiran sistem peringatan dini bencana (*early warning system*).
- Membangun infrastruktur dan sarana yang berorientasi pada kesiapan dan ketahanan dalam menghadapi kemungkinan terjadinya bencana.
- Menata koordinasi dan sinergi antar lembaga (pemerintah maupun swasta), kelompok masyarakat dan antar daerah terkait percepatan penanggulangan dan penanganan bencana.

NAWACITA 9

Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kualitas hidup masyarakat

- Membangun *database* digital potensi wilayah berbasis spasial yang melingkupi seluruh wilayah administrasi desa/kelurahan di wilayah kabupaten.

- Mewujudkan dan mengembangkan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang terintegrasi untuk mendukung Sistem *Smart Government* dalam meningkatkan kualitas pelayanan terhadap publik.
- Mendorong akses pendidikan seluas-luasnya bagi ASN yang telah memenuhi kualifikasi dan persyaratan untuk regenerasi birokrasi.
- Mewujudkan pengelolaan anggaran keuangan daerah yang efisien, efektif, akuntabel dan berpihak kepada masyarakat.



Konawe Setoran
SETARA

-2024-